



KABUPATEN POLEWALI MANDAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2024



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam LAKIP ini dilaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen Renstra DP2KBP3A Tahun 2009-2024 dan Penetapan Kinerja DP2KBP3A Tahun 2024 untuk melihat sejauhmana strategi yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Polewali Mandar sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan DP2KBP3A.

LAKIP ini memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja DP2KBP3A sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD DP2KBP3A Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD DP2KBP3A sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Polewali, 23 Januari 2025

Kepala DP2KBP3A



DR.drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197011102002122007

Daftar Isi



<i>Sampul.....</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar.....</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel.....</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Grafik.....</i>	<i>vii</i>

I

Pendahuluan

<i>1. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>2. Dasar Hukum.....</i>	<i>2</i>
<i>3. Maksud dan Tujuan.....</i>	<i>2</i>
<i>4 Tugas, Fungsi, SOTK DP2KBP3A.....</i>	<i>3</i>

II

Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

<i>5. Rencana Strategis.....</i>	<i>27</i>
<i>6. Visi dan Misi Bupati.....</i>	<i>27</i>
<i>7. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....</i>	<i>30</i>
<i>8. Penetapan Kinerja 2024.....</i>	<i>31</i>

III

Akuntabilitas Kinerja

9. Akuntabilitas Kinerja.....	38
10. Akuntabilitas Keuangan	80

IV

Penutup	88
---------------	----

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Golongan, Keadaan Desember 2024.....	10
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Eselon dan fungsional, Keadaan Desember 2024.....	11
Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Pendidikan, Keadaan Desember 2024	11
Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, Keadaan Desember 2024.....	11
Tabel 1.5. Daftar Inventaris DP2KBP3A Keadaan Desember 2024.....	14
Tabel 1.6 Jumlah Tempat Pelayanan KB tahun 2024.....	17
Tabel 1.7. Identifikasi Isu Isu Strategis Tahun 2016-2024.....	20

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1. Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan.....	27
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM.....	28
Tabel 2.3. Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019-2024.....	29
Tabel 2.4. Renstra DP2KBP3A 2025-2026.....	30
Tabel 2.5. Penetapan Kinerja DP2KBP3A 2024.....	31
Tabel 2.6. Indikator Kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD.....	41
Tabel 2.7. Penganggaran Program.....	42

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1. Indikator Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk.....	39
Tabel 3.2. Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2019–2024.....	40
Tabel 3.3. Jumlah Kepala Keluarga menurut Pendataan Keluarga.....	41
Tabel 3.4. Gambaran Umum Petugas PPKBD dan Sub PPKBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.....	42
Tabel 3.5. Daftar Nama Kampung KB dan Rumah Data yang dibentuk Tahun 2024....	43
Tabel 3.6. Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta	

KB Aktif Tahun 2019-2024.....	44
Tabel 3.7. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2024.....	45
Tabel 3.8. Jumlah Peserta KB Aktif tahun 2024.....	46
Tabel 3.9. Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang Belum terlayani (Unmet Need) 2019-2024.....	47
Tabel 3.10. Jumlah Unmet Need per Kecamatan.....	48
Tabel 3.11. Peserta KB (alseptor) Baru.....	49
Tabel 3.12. Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Terhadap PUS Tahun 2019-2024	50
Tabel 3.13. Jumlah Peserta KB MKJP tahun 2024.....	51
Tabel 3.14. Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Terhadap PUS Tahun 2019-2024	52
Tabel 3.15. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 2024...	54
Tabel 3.16. Jumlah Tenaga PLKB per Kecamatan di Polman 2024.....	54
Tabel 3.17. Frekwensi Operasional Tim KBK Kabupaten Polman Tahun 2024.....	57
Tabel 3.18. Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Tahun 2019-2024.....	59
Tabel 3.19. Perkembangan Anggota Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Tahun 2019-2024.....	60
Tabel 3.20. Perkembangan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Tahun 2019-2024	61
Tabel 3.21. Perkembangan Pembinaan PUS Peserta KB menjadi anggota UPPKA Tahun 2019-2024	63
Tabel. 3.22. Realisasi Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Peserta KB Aktif tahun 2024.....	67
Tabel 3.23. Indikator Capaian Kinerja Membaiknya Indeks Pembangunan Gender.....	69
Tabel 3.24. Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019 – 2024	70
Tabel 3.25. Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten LayakAnak (KLA) Tahun 2024.....	73
Tabel 3.26. Tingkat Kasus Kekerasan Perempuan tahun 2024.....	75
Tabel 3.27. Tingkat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 2024.....	75
Tabel 3.28. Data Kekerasan Anak tahun 2024.....	76
Tabel 3.29. Tingkat Kasus Kekerasan Anak Tahun 2019-2014.....	76
Tabel 3.30. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Tahun 2024.....	77
Tabel 3.31. Akuntabilitas Keuangan Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024	80
Tabel 3.22 Akuntabilitas Keuangan Bidang PPPA Tahun 2024.....	85

Tabel 3.33. Indikator Kinerja Kunci Keluaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.....	86
---	----

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Tata Kerja DP2KBP3A Tahun 2024.....	4
Gambar 1.2. Gedung/Kantor Dinas P2KBP3A.....	12
Gambar 1.3. Gedung Balai Penyuluhan KB di 16 Kecamatan.....	13
Gambar 1.4. Sarana dan Prasarana Dinas P2KBP3A.....	16
Gambar 3.1. Grafik Indikator Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2024.....	39
Gambar 3.2. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2019-2024.....	40
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2024.....	45
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Pasangan Usia Subur PUS Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2019-2024.....	47
Gambar 3.5. Grafik Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Tahun 2019-2024.....	50
Gambar 3.6. Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2019-2024.....	52
Gambar 3.7. Tim KB Keliling.....	56
Gambar 3.8. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahter (UPPKA).....	62
Gambar 3.9. Pusat Informasi konseling Remaja.....	65
Gambar 3.10. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2024.....	70
Gambar 3.11. Penganugerahan Piagam Predikat KLA Tingkat Pratama.....	71
Gambar 3.12. Piagam Penghargaan KLA Kategori Pratama.....	72
Gambar 3.13. Aspek Pemenuhan Kabupaten Layak Anak.....	73
Gambar 3.14. Gambar Piala Tingkatan Indikator Kabupaten Layak Anak.....	74
Gambar 3.15. Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2019-2024.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggungjawabkan sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk menyusun pertanggungjawaban dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban mengenai kinerja DP2KBP3A sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja DP2KBP3A khususnya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, Rencana Strategis (RENSTRA) DP2KBP3A Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja DP2KBP3A Tahun 2024 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2011 dan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah :

1. Untuk memaparkan pencapaian sasaran dan indikator sasaran Renstra DP2KBP3A Tahun 2019-2024;
2. Untuk memaparkan realisasi pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja DP2KBP3A tahun 2024;
3. Sebagai pembandingan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024, adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai pencapaian kinerja DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar selama satu tahun anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja DP2KBP3A dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja DP2KBP3A di masa yang akan datang;
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas P2KBP3A

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A

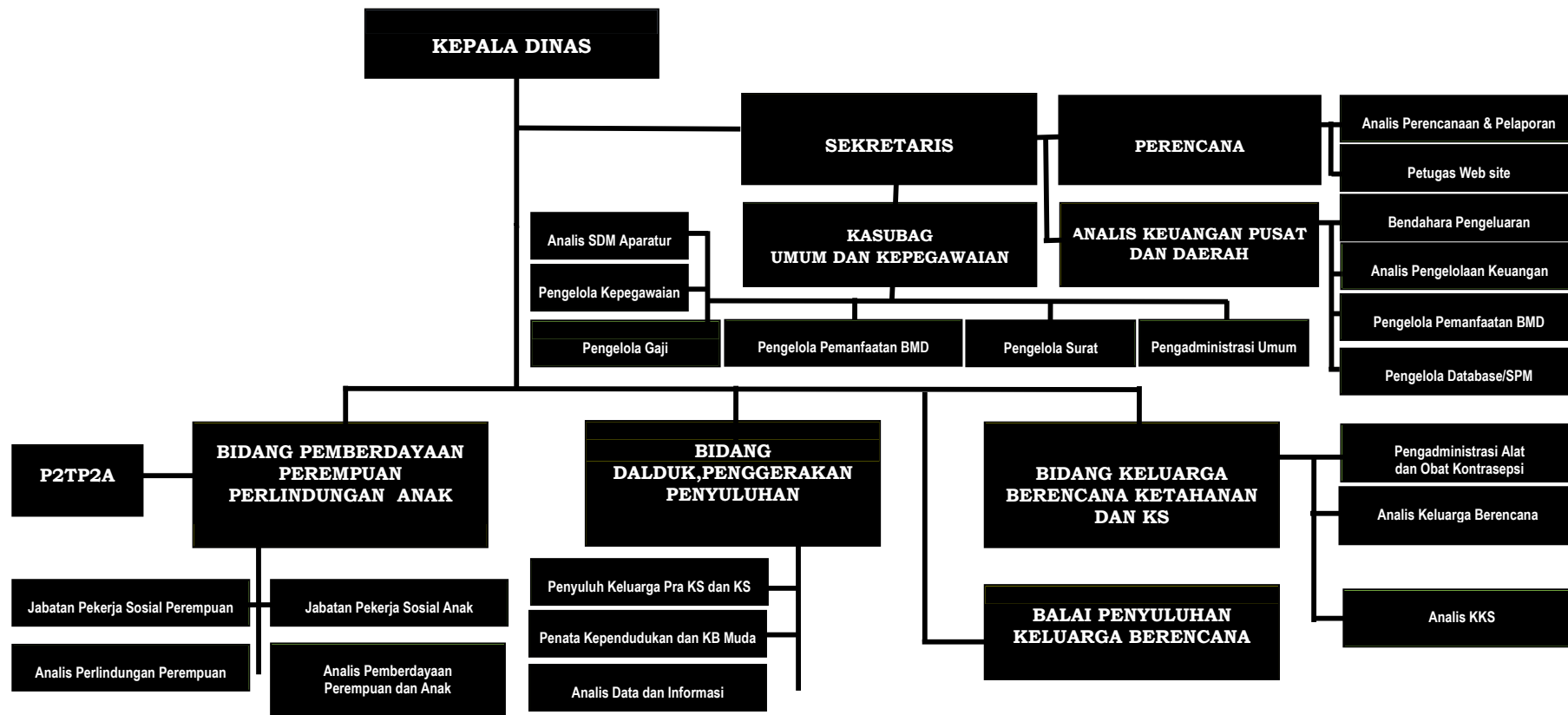
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PolewaliMandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 35 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
 1. Jabatan Fungsional Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Jabatan Fungsional Keuangan Daerah dan Pusat
- c. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan
 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 2. Seksi Advokasi, KIE Penggerakkan dan Penyuluhan
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 1. Seksi Keluarga Berencana

- 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 2. Seksi Perlindungan Anak
- f. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar terlampir dihalaman selanjutnya:

Gambar 1.1
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024



Uraian Tugas :

Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomer 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar berdasar Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar pada Bab IV pasal 3 di tetapkan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- 1). Jabatan Fungsional Perencanaan
- 2). Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah dan Pusat
- 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Peggerakan

- 1). Seksi Pengendalian Penduduk, dan informasi Keluarga
- 2). Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1). Seksi Keluarga Berencana
- 2). Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1). Seksi Pemberdayaan Perempuan dan
- 2). Seksi Perlindungan Anak

f. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan P2TP2A

Adapun yang menjadi Tupoksi masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

- (1) Membantu Bupati memelihara dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Tugas Pokok :

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerjadi bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan dan penganggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Tugas Pokok :

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyelenggarakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga;
- d. Penyelenggaraan advokasi dan penggerakan dan penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan koordinasi teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas Pokok :

(1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis Pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Keluarga Berencana;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
4. Kepala Dinas Wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
6. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
7. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
8. Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
9. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
10. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

11. Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

E. Kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

➤ **Sumber Daya Manusia**

Jumlah SDM Aparatur DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 24 orang yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (Satu) orang Sekretaris
3. 3 (Tiga) orang Kepala Bidang
 - Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. 4 orang Pejabat Fungsional
 - Pejabat Fungsional Perencanaan
 - Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Daerah dan Pusat
 - 1 Orang Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - 1 (Orang) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
5. Jabatan Fungsional Umum berjumlah 15 Staf di 3 Bidang dan Sekretariat
6. PLKB sebanyak 106 orang dimana 23 orang status PNS dan 83 orang PPPK. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang diuraikan berdasarkan Golongan Ruang, Eselon dan Fungsional, Pendidikan dan Diklat Kepemimpinan :

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Golongan Ruang, Keadaan Desember 2024

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	-
II	-	4 orang	4 orang
III	4 orang	8 orang	12 orang
IV	1 orang	6 orang	7 orang
Jumlah	5 orang	18 orang	23 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepeg. DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Eselon dan Fungsional, Keadaan Desember 2024

Eselon & Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
II/b	-	1 orang	1 orang
III/a	-	1 orang	1 orang
III/b	-	3 orang	3 orang
IV/a	-	1 orang	1 orang
JF	1 Orang	1 orang	2 orang
JFU	4 Orang	11 orang	15 orang
Jumlah	5 orang	18 orang	23 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Pendidikan, Keadaan Desember 2024

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
SLTP	-	-	-
SLTA	-	2 orang	2 orang
D3	-	2 orang	2 orang
S1	3 orang	6 orang	10 orang
S2	2 orang	7 orang	9 orang
S3	-	1 orang	1 orang
Jumlah	5 orang	18 orang	23 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

Tabel 1.5
Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, Keadaan Desember 2024

Diklat Pim	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
II	-	-	-

III	-	2 orang	2 orang
IV	1 orang	1 orang	2 orang
Jumlah	1 orang	3 orang	5 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

➤ Sarana dan Prasarana

Sarana, dan prasarana adalah komponen yang saling terkait dan sangat penting dalam mencapai tujuan dan kegiatan di Dinas P2KBP3A.

Sarana (Facilities)

Sarana adalah fasilitas atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan suatu organisasi atau proyek. Contoh sarana:

1. Gedung dan ruangan
2. Peralatan dan mesin
3. Transportasi
4. Komunikasi (telepon, internet)

1. Gedung dan Ruangan

Gambar 1.2.
Gedung/Kantor Dinas P2KBP3A



Gedung Kantor DP2KBP3A yang sekarang, digunakan sejak tahun 2012, yang berada di jalan Andi Depu No. 117 Polewali *eks* gedung kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. Dalam perjalanannya Gedung ini sudah beberapa kali berganti Perangkat Daerah yang menghuninya di mana pertama kaali adala Kantor inspektorat dan Dinas Perhubungan. DP2KBP3A, tadinya berkantor gabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (2010-2011). Selain sarana gedung induk, DP2KBP3A dalam mendukung kinerja dan tugas pokoknya dilapangan, terdapat juga :

1. Balai Penyuluh KB terdiri atas Koordinator PLKB dan PLKB/PKB PNS dan Non PNS. Ada 16 unit Balai Penyuluh KB yang tersebar di 16 Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 1.3.

Gedung Balai Penyuluhan KB di 16 Kecamatan



Tinambung



Limboro



Alu



Balanipa



Campalagian



Luyo



Tutar



Anreapi



Tapango



Binuang



Wonomulyo



Matakali



Polewali



Mapili



Bulu



Matangnga

2. Klinik KB Pemerintah melekat di Puskesmas di setiap kecamatan dan Klinik KB Swasta, yaitu : Klinik KB di PKM Binuang, Klinik KB di PKM Polewali, Klinik KB di PKM Pekkabata, Klinik KB di PKM Anreapi, Klinik KB di PKM Matakali, Klinik KB di PKM Pelitakan, Klinik KB di PKM Wonomulyo, Klinik KB di PKM Kebunsari, Klinik KB di PKM Mapilli, Klinik KB di PKM Batupanga, Klinik KB di PKM Campalagian, Klinik KB di PKM Katumbangan, Klinik KB di PKM Pambusuang, Klinik KB di PKM Tinambung, Klinik KB di PKM Limboro, Klinik KB di PKM Tutallu, Klinik KB di PKM Tutar, Klinik KB di PKM Matangnga, Klinik KB di PKM Bulu dan RSUD Polewali. Sedangkan Klinik KB Swasta, yaitu : Klinik KB Kemala, Klinik KB Maghfirah, Klinik KB Persit Candra Kirana, Klinik KB Mattirodeceng dan Klinik KB Mifta.

BUKU INVENTARIS BARANG DP2KBP3A 2024

No.	Nama	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	RB
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1985	1	Baik	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1987	1	Baik	
3	LCD	2019	10	10	
4	Kursi Kerja Esosn II	2019	1	1	
5	Mesin Sisik Jari (Finger Print)	2019	1	1	
6	Kursi Tamu	2019	1	1	
7	Komputer Pc	2020	1	1	
8	Printer	2020	1	1	
9	Papan Rumah Data	2020	1	1	
10	Laptop	2020	6	6	
11	Sepeda Motor	2020	2	2	
12	AC	2020	2	1	1
13	kursi kerja	2021	3	3	
14	Sepeda Motor	2021	3	3	
15	Printer	2021	1	1	
16	Meja Kerja	2021	5	5	
17	Kursi Kerja	2021	5	5	

18	Kursi Rapat	2021	30	30	
19	Lemari	2021	5	5	
20	Exhaust Fan	2021	4	4	
21	Rak Besi	2021	5	5	
22	AC	2021	5	5	
23	Termometer	2021	1	1	
24	Vacum Cleaner	2021	1	1	
25	Tempat sampah Besar	2021	1	1	
26	Alat Pemadam	2021	1	1	
27	Troli Pengangkut	2021	1	1	
28	Tangga Aluminium	2021	1	1	
29	Pallet	2021	5	5	
30	Antena Parabola	2021	3	3	
31	Modem Internet	2021	3	3	
32	Acces Point Wifi	2021	3	3	
33	Layanan Service	2021	3	3	
34	Personal Komputer dan Printer	2021	3	3	
35	LCD Proyektor	2021	3	3	
36	Rehab Gedung Balai	2021	5	5	
37	Laptop	2022	2	2	
38	Sepeda Motor	2022	22	22	
39	Komputer Pc	2022	4	4	
40	Printer	2022	4	4	
41	PC.Unit	2023	5	5	
42	Mobil Innova Hybrid	2023	1	1	
43	Printer All One	2023	5	5	
44	LCD dan layar LCD	2023	5	5	
45	Kursi Rapat	2023	128	128	
46	Meja rapat	2023	5	5	
47	Kursi Kerja	2023	21	21	
48	Meja Kerja	2023	21	21	
49	Lemari	2023	5	5	
50	Rak	2023	5	5	
51	AC	2023	5	5	
52	Kipas Angin	2023	6	6	
53	White Board	2023	5	5	
54	Water Tank	2023	5	5	

55	Tempat sampah Besar	2023	5	5	
56	Dispencer	2023	1	1	
57	Personal Computer	2024	11	11	
58	Air Conditioner Split	2024	11	11	
59	Printer Epson	2024	12	12	
60	LCD Proyektor	2024	10	10	
61	Lemari Kaca	2024	20	20	
62	White Board	2024	11	11	
63	Meja Kerja	2024	44	44	
64	Kursi Kerja	2024	44	44	
65	Meja Rapat	2024	11	11	
66	Kursi Rapat	2024	185	185	
67	Kipas Angin	2024	8	8	
68	Tandon Air	2024	6	6	
69	Dispenser	2024	3	3	
70	Mesin Pompa Air	2024	3	3	

Sumber : Bendahara Barang DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar 2023

3. Peralatan dan mesin

Gambar 1.4.

Sarana dan Prasarana Dinas P2KBP3A



Peralatan untuk mendukung pelayanan KB

3. Transportasi



4. Komunikasi (telepon, internet)



Jaringan Internet terdiri dari 3 (tiga) Wifi untuk mendukung pelaporan Newsiga BKKBN

TABLE 1.6
JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

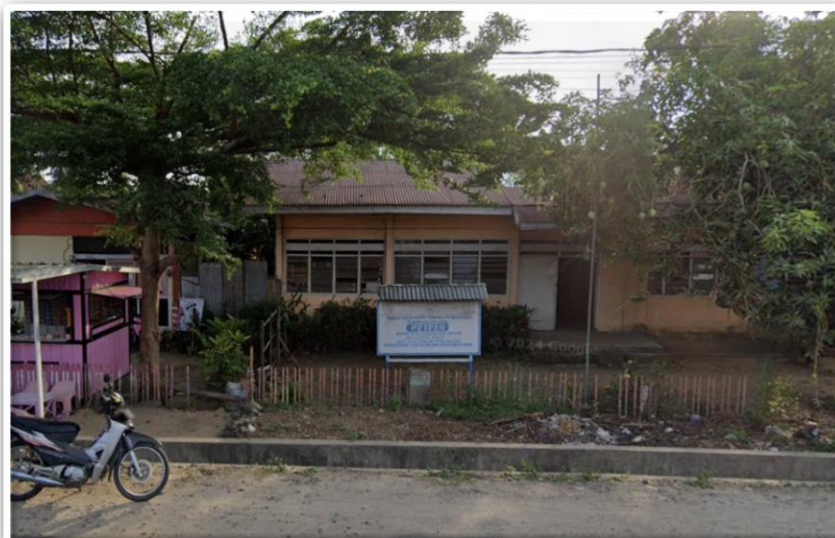
NO	KECAMATAN	JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB	JENIS TEMPAT PELAYANAN KB								PRAKTEK BIDAN MANDIRI	PUSTU/POS KEDES /BIDAN MANDIRI
			JUMLAH FASKES	JENIS FASKES								
				RS UMUM	RS KHUSUS	KLINIK UTAMA	PUSKESMAS	KLINIK PRATAMA	RS TIPE D PRATAMA			
1	Tinambung	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7	
2	Campalagian	17	2	0	0	0	2	0	0	0	15	
3	Wonomulyo	17	3	0	0	0	2	0	1	0	14	
4	Polewali	12	7	1	1	1	2	2	0	0	5	
5	Tutar	13	1	0	0	0	1	0	0	0	12	
6	Binuang	14	2	0	0	0	2	0	0	0	12	
7	Tapango	14	1	0	0	0	1	0	0	0	13	
8	Mapilli	12	1	0	0	0	1	0	0	1	10	
9	Matangnga	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7	
10	Luyo	11	1	0	0	0	1	0	0	0	10	
11	Limboro	10	1	0	0	0	1	0	0	0	9	

12	Balanipa	11	1	0	0	0	1	0	0	0	10
13	Anreapi	6	1	0	0	0	1	0	0	0	5
14	Matakali	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7
15	Alu	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7
16	Bulo	9	1	0	0	0	1	0	0	0	8
		178	26	1	1	1	20	2	1	1	151

4. Gudang Alkon, di kompleks BTN Pembangunan Berlanjut Kelurahan Madatte Kec. Polewali.



5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Rumah Singgah yang berada di Kecamatan Matakali terdiri Pengelola, Konselor dan Tenaga Pendamping Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak



F. ISU STRATEGIS

Untuk melakukan suatu sistem perencanaan yang strategis, suatu organisasi perlu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di daerah dengan metode analisis **SWOT**, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di DP2KBP3A yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di DP2KBP3A pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar DP2KBP3A sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019–2024. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Permasalahan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan suatu gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan tentunya hal ini juga masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang menjadi penyebab/menghambat pencapaian kinerja.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka identifikasi permasalahan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar untuk setiap bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi untuk menjawab pelaksanaan program KKB dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai berikut:

1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Manajemen penyediaan dan distribusi alokon;
- b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB khususnya MKJP;
- c. Pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi bagi remaja;
- d. Persebaran ratio PKB/PLKB di setiap Kecamatan;

- e. Pengembangan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera
- f. Pengembangan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKA);
- g. Pemuktahiran Data Kependudukan dan Keluarga (SIGA);
- h. Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD);
- i. Penguatan dan kualitas lini lapangan (PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD, kader KB) termasuk mekanisme operasional;
- j. Sistem pencatatan pelaporan serta penyediaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB;
- k. Pelatihan Bidan khususnya Bidan Swasta untuk pemasangan IUD dan Implan;
- l. Pelatihan Dokter khususnya Dokter Swasta untuk pemasangan MOW dan MOP;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Penyediaan Sistem Informasi Gender dan Anak;
- b. Penyediaan tenaga ahli dalam penanganan KDRT seperti : tenaga pendamping, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, tenaga sosial dan tenaga ahli lainnya;
- c. Advokasi tentang kesetaraan dan keadilan gender;
- d. Advokasi penganggaran responsif gender dan anak;
- e. Pendampingan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga;
- f. Sistem pencatatan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- g. Pembentukan dan pengembangan forum anak;
- h. Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Tabel 1.7 .

Identifikasi Isu Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2019-2024

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN		
	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).	Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai dan masih ada kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah daerah tentang program Bangga Kencana, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimasukkan dalam perencanaan daerah serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB

		Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah
2	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga kencana baik antara provinsi, antara wilayah pedesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal
3	Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS	Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pengolahan data Luasnya cakupan wilayah pendataan keluarga serta sulitnya akses menuju lokasi merupakan kendala sarana dan prasarana oleh para pengumpul data di lapangan Data sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB, namun data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan dan KB, belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Bangga kencana, dikarenakan system pengolahan data masih kurang berkualitas
II	BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata	Pemakaian kontrasepsi belum meningkat secara signifikan

		Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi Rendahnya pengguna MKJP Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/ klinik pelayanan KB Peran Bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal Kualitas penyuluh KB perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan
2	Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria) Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah

3	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga	Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah Kualitas hidup Lanjut Usia (Lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok kegiatan/Poktan, yang terdiri dari ; Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan
III	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif, melalui; pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan	Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi

	anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga	
2	Memperkuat sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak melalui ketersediaan sistem data pilah gender dan anak, peningkatan kapasitas pengelola data melalui forum data	Meningkatkan sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM pengelola Data dan penyediaan SIGA dan infrastruktur termasuk jaringan yang optimal dengan fokus Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA
3	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah melalui pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak melalui pencapaian kabupaten Polewali Mandar sebagai kabupaten Layak Anak	

Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

- **Dinamika Internasional :**

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) adalah sebuah agenda integritas ekonomi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini sepuluh Negara anggota ASEAN memiliki :

- Populasi lebih dari 600 juta jiwa.
- Nilai perdagangan intra-ASEAN sekitar US\$ 600 milyar.
- Nilai perdagangan eksternal sekitar US\$ 1.800 milyar.
- Jumlah wisman diatas 35 juta orang/tahun.

Kawasan bebas perdagangan barang, modal dan jasa (12 sektor prioritas) untuk daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Menjadikan ASEAN sebagai basis **produksi dunia** serta menciptakan **pasar regional** bagi 575 juta jiwa penduduk ASEAN.

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara ASEAN yang penduduknya paling banyak. Pada 2020, tercatat sebanyak lebih dari 270 juta jiwa menempati negara Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), berikut urutan negara dengan populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara pada tahun lalu.

1. Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa
2. Filipina, dengan jumlah penduduk mencapai 109.581.078 jiwa
3. Vietnam, dengan jumlah penduduk mencapai 97.338.579 jiwa
4. Thailand, dengan jumlah penduduk mencapai 69.799.978 jiwa
5. Myanmar, dengan jumlah penduduk mencapai 54.409.80 jiwa
6. Malaysia, dengan jumlah penduduk mencapai 32.366.00 jiwa
7. Kamboja, dengan jumlah penduduk mencapai 26.718.965 jiwa
8. Laos, dengan jumlah penduduk mencapai 7.275.56 jiwa
9. Singapura, dengan jumlah penduduk mencapai 5.850.342 jiwa
10. Brunei Darussalam, dengan jumlah penduduk mencapai 437.48 jiwa

Dinamika Nasional :

- Nawacita, Sembilan program yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakkan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform.

BKKBN mendukung agenda prioritas No.5 yaitu ; **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia** melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- Stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program Bangga kencana di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program Bangga kencana untuk periode 2015-2019, salah satu diantaranya adalah adanya **Pembentukan Kampung KB** dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Bangga kencana secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal BKKBN maupun lintas sektor di lini lapangan.

● **Dinamika Regional/ Lokal :**

- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pembangunan infrastruktur belum memadai.
- Pengembangan ekonomi kerakyatan.
- Pengelolaan sumber daya alam & lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Beberapa permasalahan di atas memberikan informasi yang cukup tentang pencapaian Program Bangga kencana di Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode 2019-2024, dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

(memuat Latar Belakang yang menjelaskan tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan dan juga mengenai Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi yang memuat penjelasan umum tentang organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi).

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

(memuat Rencana Strategis yang menjelaskan tentang Renstra DP2KBP3A, visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja Utama/sasaran dalam Renstra DP2KBP3A) dan juga mengenai Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang memuat Target Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024)

BAB III. AKUNTABILITAS

(Menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja pertujuan, persasaran dan perindikator sasaran. Dan untuk setiap indikator sasaran, dijelaskan dengan tabel atau grafik dan penjelasan memadai yaitu perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024, membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, menguraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan dan Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan. Dan juga penjelasan mengenai Akuntabilitas Keuangan yang menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja)

BAB IV. PENUTUP

(memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja langkah-langkah masa datang organisasi)

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Pengukuran Kinerja tahun 2024
- Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB II

RENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah			
Visi :			
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera			
Misi 1			
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera dan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan	engendalian laju Pertumbuhan Penduduk Peningkatan Kepesertaan KB aktif	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender Peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi, departemen, atau individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

IKU/KPI biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Spesifik: IKU/KPI harus jelas dan spesifik, sehingga tidak ada keraguan tentang apa yang diukur.
2. Terukur: IKU/KPI harus dapat diukur secara kuantitatif, sehingga dapat dilacak dan dievaluasi.
3. Relevant: IKU/KPI harus relevan dengan tujuan dan sasaran organisasi.
4. Terdapat target: IKU/KPI harus memiliki target yang jelas, sehingga dapat diukur apakah kinerja telah mencapai target.
5. Dapat dilacak: IKU/KPI harus dapat dilacak dan diukur secara teratur, sehingga dapat memantau kemajuan kinerja.

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,92	1,02	0,92	0,82	0.82	0.72	0.72
	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	77,63	80,99	77,63	80,99	84,27	88,27	88,27
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,27	92,54	92,8	92,8	93,07	93,10	93,10
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA	KLA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 yang menjadi salah satu pengampu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan tugasnya adalah dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh kementerian Dalam negeri terkait mutu pelayanan dan indikator kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Bidang/Urusan/Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,92	1,02	0,92	0,82	0.82	0.72
	Persentase Peserta KB Aktif	77,63	80,99	77,63	80,99	84,27	88,27
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Indeks Pembangunan Gender	92,27	92,54	92,8	92,8	93,07	93,10
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 menetapkan tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

RENCANA STRATEGIS DP2KBP3A 2019-2024															
TARGET KEGIATAN															
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL	TARGET											
			2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
					250.000.000		255.000.000		264.000.000		276.000.000		286.000.000		300.300.000
	Sosialisasi Materi Kependudukan sesuai dengan Kearifan Lokal	Jumlah Sosialisai materi kependudukan yang diadakan	0	3 SSK	51.000.000	4 SSK	52.050.000	5 SSK	54.652.500	6 SSK	57.385.125	6 SSK	60.254.381	6 SSK	63.267.100
	Penyediaan Informasi Dampak Kependudukan dan Pengadaan Media KIE	Jumlah Jenis Informasi yang disediakan	0	2 Jenis	14.300.000	2 Jenis	13.515.000	2 Jenis	14.190.750	2 Jenis	14.900.288	2 Jenis	15.645.310	2 Jenis	16.427.576
	Pengelolaan Data dan Informasi Program Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang dikelola	3 Dokumen	4 Dokumen	35.200.000	5 Dokumen	35.460.000	5 Dokumen	33.483.000	5 Dokumen	33.957.150	5 Dokumen	31.855.000	5 Dokumen	33.447.750
	Peningkatan Kemitraan dalam Pengendalian Pelaksanaan Program KKBPK	Jumlah Mitra yang terlibat	0	160	49.500.000	170	50.475.000	180	52.998.750	190	55.648.688	200	58.431.122	200	61.352.678
	Penyuluhan Keluarga Berencana bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan penyuluhan	0	500 RTM	100.000.000	500 RTM	103.500.000	500 RTM	108.675.000	500 RTM	114.108.750	500 RTM	119.814.188	500 RTM	125.804.897
					6.747.064.400		6.815.000.000		7.034.000.000		7.338.000.000		7.589.000.000		7.968.450.000
	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah PUS yang menerima layanan KB	0	37 kali	30.190.000	41 kali	31.699.500	45 kali	33.284.475	49 kali	34.948.699	53 kali	36.696.134	53 kali	38.530.940
	Penyediaan sarana dan prasarana Penyuluh Keluarga Berencana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluh KB yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	6.408.715.000	5 Jenis	6.512.233.130	5 Jenis	6.716.094.786	5 Jenis	7.004.199.526	5 Jenis	7.238.509.502	5 Jenis	7.600.434.977
	Pembinaan Kader kelompok Keluarga Berencana	Jumlah kader Kelompok KB yang dibina	0	30 Poktan	222.853.400	30 Poktan	233.996.070	30 Poktan	245.695.874	30 Poktan	257.980.667	30 Poktan	270.879.701	30 Poktan	284.423.686
	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang di bina	0	40 kader Keluarga	35.306.000	45 kader keluarga	37.071.300	50 kader keluarga	38.924.865	50 kader keluarga	40.871.108	50 kader keluarga	42.914.664	50 kader keluarga	45.060.397
	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	Jumlah Keluarga Balita dan Anak yang diberi Pembinaan	0	125 orang	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					404.808.200		409.000.000		422.000.000		440.000.000		455.000.000		477.750.000
	Evaluasi PUG	Jumlah peserta evaluasi PUG	0	20 orang	27.268.200	25 orang	28.631.610	30 orang	30.063.191	35 orang	31.566.350	40 orang	33.144.668	40 orang	34.801.901
	Peningkatan Peran serta OPD dalam pelaksanaan PPRG	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG		10 OPD	27.540.000	10 OPD	28.917.000	10 OPD	30.362.850	10 OPD	31.880.993	12 OPD	33.475.042	12 OPD	35.148.794
	Penguatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang diberdayakan	16 Kecamatan	350 Anggota PKK	350.000.000	350 Anggota PKK	351.451.390	350 Anggota PKK	361.573.959	350 Anggota PKK	376.552.657	350 Anggota PKK	388.380.290	350 Anggota PKK	407.799.305
					201.534.400		204.000.000		211.000.000		221.000.000		229.000.000		240.450.000

	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	16 Kecamatan	35 kasus	77.546.000	35 kasus	81.423.300	35 kasus	85.494.465	35 kasus	89.769.188	35 kasus	94.257.648	35 kasus	98.970.530
	Pelaksanaan Forum Desa Layak Anak	Jumlah Desa Layak Anak yang dilaksanakan	120 Anak Anggota Forum Anak	130 Anak Anggota Forum	123.988.400	140 Anak Anggota Forum	122.576.700	150 Anak Anggota Forum	125.505.535	160 Anak Anggota Forum	131.230.812	170 Anak Anggota Forum	134.742.352	170 Anak Anggota Forum	141.479.470
				BAIK	350.000.200	BAIK	342.700.000	BAIK	388.400.000	BAIK	451.900.000	BAIK	504.580.000	BAIK SEKALI	561.875.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola	14 Kali	20 Surat	21.096.000	20 Surat dan 4 Honorer	20.517.000	20 Surat dan 4 Honorer	30.775.500	20 Surat dan 4 Honorer	43.896.000	20 Surat dan 4 Honorer	45.500.000	20 Surat dan 4 Honorer	47.775.000
	Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, aistr dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	2 Jenis x 12 Bulan	15.900.000	2 Jenis x 12 Bulan	15.900.000	2 Jenis x 12 Bulan	16.818.000	2 Jenis x 12 Bulan	17.540.000	2 Jenis x 12 Bulan	18.200.000	2 Jenis x 12 Bulan	19.110.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	12 Bulan	77 unit	18.160.000	2 Jenis 5 unit Mobil dan 68 Unit Motor	18.160.000	2 Jenis 5 unit Mobil dan 68 Unit Motor	20.353.100	2 Jenis 5 unit Mobil dan 68 Unit Motor	21.228.000	2 Jenis 5 unit Mobil dan 68 Unit Motor	29.000.000	2 Jenis 5 unit Mobil dan 68 Unit Motor	34.450.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	41 Jenis	40 Jenis	17.746.400	40 Jenis	17.746.400	40 Jenis	18.000.000	40 Jenis	18.774.000	40 Jenis	26.500.000	40 Jenis	31.825.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	100 Exp	100 exmp	14.629.400	3 Jenis	14.629.400	3 Jenis	17.500.000	3 Jenis	20.450.000	3 Jenis	24.500.000	3 Jenis	28.725.000
	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	Jumlah jenis layanan yang dikelola		3 Jenis	6.640.000	3 Jenis	6.640.000	3 Jenis	6.640.000	3 Jenis	6.925.500	3 Jenis	7.200.000	3 Jenis	7.560.000
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makan minum yang tersedia	440 Kotak nasi dan 440 Snack	2 Jenis	42.300.000	2 Jenis	42.300.000	2 Jenis	46.530.000	2 Jenis	51.400.000	2 Jenis	61.000.000	2 Jenis	67.050.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	56 Kali	21 SPPD	107.473.000	20 SPPD	105.897.000	29 SPPD	128.585.400	30 SPPD	130.682.200	33 SPPD	132.133.250	37 SPPD	156.296.702
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	56 Kali	22 SPPD	8.900.000	25 SPPD	8.900.000	30 SPPD	9.300.000	35 SPPD	10.350.000	40 SPPD	14.000.000	45 SPPD	16.100.000
	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis mebeleur	4 Jenis	1 jenis	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	1 paket CCTV	7.522.500	0	0	0	0
	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	Jumlah unit komputer PC/ notebook	2 Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Unit	17.815.800	2 Unit	17.815.800
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	2 Orang x 12 Bulan	2 Jenis	12.561.200	2 Jenis	11.956.500	2 Jenis	12.550.000	2 Jenis	13.100.000	2 Jenis	13.558.500	2 Jenis	14.236.425
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	42 Meter	42 Meter	18.723.200	42 Meter	18.137.000	0	0	42 Meter	20.000.000	42 Meter	20.700.000	42 Meter	21.735.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	2 Jenis, 4 mobil 70 motor	2 Jenis, 4 mobil 68 motor	62.371.000	2 Jenis, 5 mobil 68 motor	61.916.700	2 Jenis, 5 mobil 68 motor	64.085.000	2 Jenis, 5 mobil 68 motor	67.000.000	2 Jenis, 5 mobil 68 motor	70.500.000	2 Jenis, 5 mobil 68 motor	74.025.000

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan yang terpelihara	0	0	0	0	0	6 Item	3.780.000	6 Item	3.969.000	6 Item	4.167.450	6 Item	4.375.823
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	0	-	0	-	0	30 orang	13.483.000	30 orang	14.062.800	30 orang	14.555.000	30 orang	15.282.750
	Penataan Administrasi kepegawaian	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan tertib			0	0	0	0	0	5 Jenis adminpeg	5.000.000	5 Jenis adminpeg	5.250.000	5 Jenis adminpeg	5.512.500
				B	10.000.000	B	10.129.000	B	10.939.000	B	12.079.000	BB	13.019.000	BB	14.046.000
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0	1 Dokumen	10.000.000	0	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	10.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	4.000.000	0	0
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0	0	0	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.160.000	2 Dokumen	5.381.000	2 Dokumen	5.019.000	2 Dokumen	0
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	0	0	0	1 Dokumen	5.129.000	1 Dokumen	5.779.000	0	6.698.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.046.000
			-	20%	-	20%	5.000.000	20%	1.434.000	20%	1.934.000	20%	2.364.000	20%	2.818.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu		1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.071.000	1 Dokumen	1.434.000	1 Dokumen	1.934.000	1 Dokumen	2.364.000	1 Dokumen	2.818.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi/unit kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2024, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya di sebut **pihak pertama**

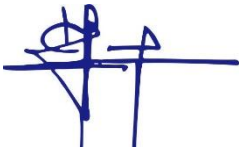
Nama : **MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua


MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA
PATANDIANAN, MARS

Pihak Pertama



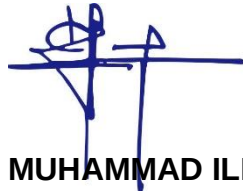
DR. drg. SRIHARNI

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197011102002122007

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,99%	0,72%
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB aktif	56,96%	88,27%
3	Meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	51,80	51,50
4	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,92%	93,10%
5	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya
6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik
NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.439.368.749	APBD
2	Pengendalian Penduduk	Rp	506.000.000	APBD / APBN
2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	4.727.014.000	APBD / APBN
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1.864.800.000	APBN
3	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	190.000.000	APBD
4	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	300.000.000	APBD
JUMLAH		Rp	10.027.182.749	APBD/APBN

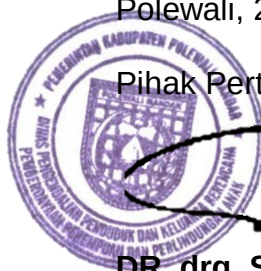
Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua



**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA
PATANDIANAN, MARS**

Pihak Pertama



DR. drg. SRIHARNI

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701110 200212 2 007

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1
Uraian Sasaran

Indikator Kinerja

Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Sumber data penduduk yang digunakan adalah Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat berikut ini : - Tahun 2020 : 1,25 - Tahun 2021 : 1,22 - Tahun 2022 : 1,17	
---	--

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	Pemenuhan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana meliputi pembinaan Poktan Tribina serta UPPKA, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{Pt}{Po} \right) \times 100$ r = Laju pertumbuhan penduduk t = Jangka waktu perhitungan ln = Eksponen dengan nilai 2,718281828 Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun perhitungan	Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase laju Pertumbuhan Penduduk	0,72%	Setelah dilakukan perbandingan mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia untuk tahun 2022 sejumlah 1,17 % maka di tahun 2023 penurunan Laju pertumbuhan penduduk diharapkan bisa tercapai dengan meningkatnya Program Bangga Kencana di Kabupaten Poewali Mandar

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan

Indikator Kinerja

Persentase Peserta KB Aktif Pasangan Usia Subur (PUS) : Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi dan secara Aktif KB masih menggunakan atau memakai metode alat kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Metode itu adalah MOW : Medis Operatif Wanita atau tubektomi MOP : Medis Operatif Pria atau vasektomi". **Klasifikasi** : Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Kondom, Peserta KB Aktif Suntik, Peserta KB Aktif Pil, Peserta KB Aktif AKDR, Peserta KB Aktif MOP, Peserta KB Aktif MOW, Peserta KB Aktif Implan.

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Pelaksanaan dan pelayanan Program Keluarga Berencana meliputi konseling kontrasepsi mulai dari suntik, pil, kondom, hingga layanan kontrasepsi MKJP yang meliputi IUD, Implan, MOP dan MOW	Jumlah Peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur * 100%	Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Peserta KB Aktif	88,27	Pasangan Usia Subur (PUS) : Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi dan secara Aktif KB masih menggunakan atau memakai metode alat kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Metode itu adalah MOW : Medis Operatif Wanita atau tubektomi MOP : Medis Operatif Pria atau vasektomi". Klasifikasi : Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Kondom, Peserta KB Aktif Suntik, Peserta KB Aktif Pil, Peserta KB Aktif AKDR, Peserta KB Aktif MOP, Peserta KB Aktif MOW, Peserta KB Aktif Implan

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Keluarga Sejahtera

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa sangat penting dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga untuk menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Capaian iBangga di level Kab/Kota, Provinsi dan Nasional dapat menentukan level pembangunan keluarga suatu wilayah. Termasuk mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga ditingkat keluarga	iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).	Bidang KB dan KKS Dinas P2KBP3A

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Indeks Pembangunan Keluarga	51,50	Penentuan target 51,50 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024, didasari atas capaian tahun 2023 (51,80)

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Indeks Pembangunan Gender	Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$	Bidang PPPA Dinas P2KBP3A

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Indeks Pembangunan Gender	93,10	Penentuan target 93,10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024, didasari atas capaian tahun 2023 (91,92) berarti ada peningkatan Indeks sebesar 1,18

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan Kebijakan Pengembangan KLA untuk mewujudkan KLA. Pasal 4 (1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang: a. konsep KLA; b. hak anak; dan c. pendekatan pengembangan KLA. (2) Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat mengevaluasi penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	• Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak • Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.	Predikat KLA : 1. PRATAMA Skor 500-600 2. MADYA Skor 600-700 3. NINDYA Skor 700-800 4. UTAMA Skor 800-900 5. KLA Skor 900-1000	Bidang PPPA Dinas PZKBP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1 Predikat Kabupaten Layak Anak	MADYA	Penentuan target Madya karena capaian Pratama telah diperoleh Kabupaten Polewali mandar pada tahun 2022 berupa penghargaan Bupati Polewali mandar oleh Menteri PPPA

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
----	--------	-----------	-----------	-------------

1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas KominfoSP
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan}}{\text{Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan}} \times 100$	Sekretariat Dinas KominfoSP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A (86,00) tahun 2023 optimis diraih Dinas KominfoSP, dengan melihat Capaian SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat B; 78,27), tahun 2021 (Predikat A; 82,76) dan tahun 2022 (predikat A; 85,94)
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,87%), 2021 (100%) serta 2022 (100%)

3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas KominfoSP yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Sangat Baik; 81,49), 2021 (Predikat Sangat Baik; 97,04) serta 2022 (Predikat Sangat Baik; 98,79). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik tahun 2023
---	--	-------------	---

2.3 Instrument Pendukung Tahun 2024

Tabel. 2.6

Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019- 2024									
NO	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018/2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
2	Presentase Peserta KB Aktif	Persen	78	78	78	78	78	78	78
3	IPG	Indeks	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27	92,27
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA	KLA
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Predikat SAKIP rata rata perangkatdaerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
6	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persen	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Tabel 2.7

PENGANGGARAN PROGRAM

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN ANGGARAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	250.000.000	255.000.000	264.000.000	276.000.000	286.000.000	300.300.000
2	Program Keluarga Berencana	Prosentase peserta KB Aktif	6.747.064.400	6.815.000.000	7.034.000.000	7.338.000.000	7.589.000.000	7.863.000.000
3	Program Pemberdayaan Perempuan	IPG	404.808.200	409.000.000	422.000.000	440.000.000	455.000.000	477.750.000
4	Program Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	201.534.400	204.000.000	211.000.000	221.000.000	229.000.000	240.450.000
5	Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran	350.000.200	342.700.000	388.400.000	451.900.000	504.580.000	561.875.000
6	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Predikat SAKIP rata rata perangkatdaerah	10.000.000	10.129.000	10.939.000	12.079.000	13.019.000	14.046.000
7	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	-	5.000.000	1.434.000	1.934.000	2.364.000	2.818.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi DP2KBP3A.

A. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dengan target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Kemudian, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran strategis, faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja dan penyebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1
Indikator Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		%Rp.
				K	Rp.	K	Rp.	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IPG	Indeks	93,1 Indeks	2.638.752.749			
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	50.000.000			
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	25.000.000			

1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	PD	29 Perangkat Daerah	25.000.000			
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1 Lembaga	250.000.000			
2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1 Lembaga	250.000.000			
II	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Predikat Madya	190.000.000		31.001.400	16,32
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	96 Orang	190.000.000	19 Orang	31.001.400	16,32
1.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	96 Orang	120.000.000	19 Orang	23.898.200	19,92
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	35 Dokumen Kasus	70.000.000	3 Dokumen Kasus	7.103.200	10,15
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,72 Persen	506.000.000	0,08 Persen	62.090.893	12,27
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,72 Persen	265.000.000	0,13 Persen	49.592.600	18,71
1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Laporan	6 laporan Satuan Pendidikan	265.000.000	1 laporan Satuan Pendidikan	49.592.600	18,71

2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,72 Persen	241.000.000	0,03 Persen	12.498.293	5,19
2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1 Laporan	60.000.000			
2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1 Dokumen	181.000.000	0,06 Dokumen	12.498.293	6,91
V	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	%	88,27 Persen	6.436.971.000	0,09 Persen	703.469.600	10,93
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peserta KB aktif	%	88,27 Persen	2.695.400.000	16 Persen	448.954.800	16,66
1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1 Laporan	840.000.000	0,10 Laporan	91.866.800	10,94
1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Laporan	1 Laporan	1.014.400.000	0,03 Laporan	37.850.000	3,73
1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1 Laporan	240.000.000	0,49 Laporan	118.838.000	49,52
1.4	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1 Dokumen	601.000.000	0,33 Dokumen	200.400.000	33,34
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,72 Persen	150.200.000	0,05 Persen	10.895.000	7,25
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	90 Orang	150.200.000	6 Orang	10.895.000	7,25

3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,72 Persen	2.812.121.000	0,04 Persen	184.391.800	6,56
3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1 Laporan	123.400.000	0,04 Laporan	5.356.800	4,34
3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1697 Orang	803.064.000	378 Orang	179.035.000	22,29
3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	5 Unit	1.764.957.000			
3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1 Laporan	120.700.000			
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,72 Persen	779.250.000	0,05 Persen	59.228.000	7,60
4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Desa	47 Kampung	779.250.000	3 Kampung	59.228.000	7,60
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	88,27 Persen	1.864.800.000	18 Persen	390.720.000	20,95
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	88,27 Persen	1.864.800.000	18 Persen	390.720.000	20,95
1.1	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	888 Orang	1.864.800.000	186 Orang	390.720.000	20,95

Jumlah	14.085.276.498		2.434.114.359	17,28
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				17,28
Predikat Kinerja				Sangat Rendah

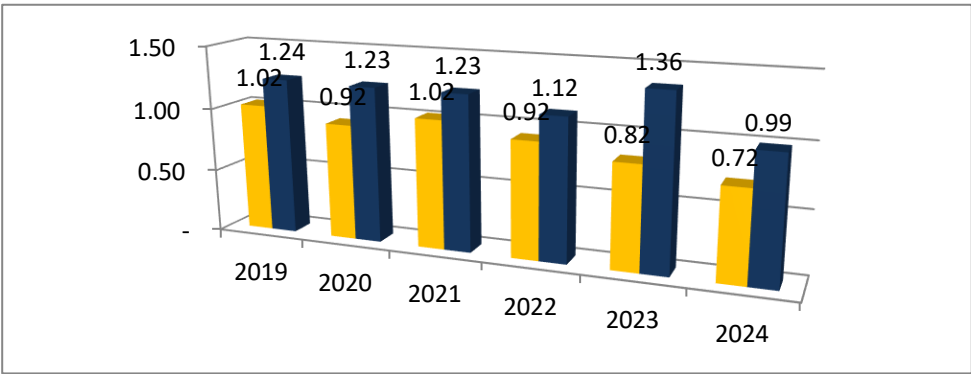
1. Sasaran 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024. Indikator kinerja sasaran beserta target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Indikator Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	1,02	1,24	122
2020	0,92	1,23	134
2021	1,02	1,23	121
2022	0,92	1,12	122
2023	0,82	1,36	166
2024	0,72	0,99	138

Gambar 3.1
Grafik Indikator Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk



Bidang yang bertugas untuk mewujudkan sasaran nomor 1 adalah bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan sedangkan sasaran nomor 2 adalah bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan. Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi materi kependudukan yang diadakan di SSK

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran dimana didalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana

Materi Kependudukan Diintegrasikan Dengan Mata Pelajaran Sesuai Dengan Pokok Bahasan Sehingga Bukan Mata Pelajaran Baru, Tidak Menambah Jam Pelajaran, Tidak Mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar Namun Justru Mempertajam Materi Yang Dibahas Program SSK Menjadi Wadah Bagi Program-program Yang Digulirkan Bkkbn Seperti Pik Remaja, Genre Goes To School, Dan Lain-lain. Sehingga Dapat Berjalan Berdampingan Dan Simultan

Program SSK Berbasis Kurikulum Nasional Sehingga Tidak Akan Ada Perbedaan Karakteristik Wilayah Baik Secara Geografis maupun Administratif Program SSK bersifat gradual karena meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran tersebut sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan Program SSK ini akan konsisten karena akan terus dilaksanakan selama mata pelajaran dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum

Data Kependudukan yang diobservasi, dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan dikomunikasikan oleh para siswa adalah data kependudukan tempat tinggal para siswa sendiri sehingga diharapkan muncul kesadaran dan tanggungjawab terhadap kondisi kependudukan di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan semenjak tahun 2019.

Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang sudah tersosialisasi pada tahun 2024 sebanyak 6 sekolah sementara di tahun sebelumnya 2023 sebanyak 4 dan tahun 2022 sebanyak 4 sekolah, tahun 2021 sebanyak 5 sekolah dan di tahun 2022 hanya bisa direalisasikan 4 sekolah karena faktor anggaran yang minim. Terkait dengan indikator ini perkembangan dan realisasi cakupan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2019 s/d 2024, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.2

Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah
siaga kependudukan Tahun 2019-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	3	3	100
2020	4	4	100
2021	5	5	100
2022	4	4	100
2023	4	4	100
2024	6	6	100

Gambar 3.2

Grafik Perkembangan Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) Tahun 2019-2024



2. Informasi dampak kependudukan dan pengadaan media KIE

Informasi dampak kependudukan adalah informasi mengenai Perubahan jumlah penduduk ini ditentukan oleh komponen-komponen kependudukan, seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Penduduk besar akan memberikan dampak positif jika SDM-nya berkualitas, tetapi akan berdampak negatif kalau penduduk tidak berkualitas, sehingga menjadi beban Pembangunan

Tabel 3.3

**JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

PERIODE: s.d Desember 2024

WILAYAH: Kabupaten Polewali Mandar

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	TINAMBUNG	4,755	2	9	53	273	457	641	612	591	615	482	375	645
02	CAMPALAGIAN	12,210	0	25	245	763	1,264	1,496	1,633	1,486	1,727	1,246	853	1,472
03	WONOMULYO	10,674	2	10	159	689	997	1,262	1,443	1,468	1,436	1,136	799	1,273
04	POLEWALI	10,509	1	4	131	528	1,014	1,332	1,549	1,423	1,395	1,128	768	1,236
05	TUTAR	3,725	0	2	79	308	459	565	570	501	485	296	218	242
06	BINUANG	7,521	3	7	126	436	883	1,085	1,012	948	1,055	755	477	734
07	TAPANGO	5,501	1	1	85	343	610	715	805	778	769	464	348	582
08	MAPILLI	6,389	1	10	148	450	728	791	894	848	845	607	381	686
09	MATANGGA	1,204	0	0	26	93	121	173	176	191	150	109	66	99
10	LUYO	6,263	1	5	97	440	666	820	848	808	893	591	399	695
11	LIMBORO	3,720	0	2	40	189	345	409	426	437	581	373	309	609
12	BALANIPA	6,096	1	14	195	482	691	820	765	770	724	591	404	639
13	ANREAPI	2,185	0	1	21	134	204	285	349	302	324	193	138	234
14	MATAKALI	5,145	1	1	70	326	551	669	743	744	667	457	367	549
15	ALLU	2,869	4	8	68	148	272	315	351	415	427	269	203	389
16	BULO	2,232	1	5	81	232	262	303	299	280	276	204	112	177
JUMLAH TOTAL		90,998	18	104	1,624	5,834	9,524	11,681	12,475	11,990	12,369	8,901	6,217	10,261

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran 2024
<https://portalpk-siga.bkkbn.go.id/tabulasi/IK/Tabel1>

3. Dokumen data dan Informasi yang dikelola

Dokumen data dan informasi yang di kelola meliputi :

- Angka kelahiran total Kabupaten
- Angka Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita Usia Subur
- Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Polewali mandar
- Angka kebutuhan KB PUS yang belum termenuhi (Unmet need) seluruh Kabupaten Polewali mandar
- Angka pemakaian KB cara modern menurut karakteristik latar belakang di Kabupaten Polewali mandar
- Angka PUS Kabupaten Polewali mandar
- Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Polewali mandar
- Angka peserta KB Aktif seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Angka peserta KB Baru per mix kontrasepsi seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Presentase peserta KB Aktis MKJP Kabupaten Polewali mandar
- Tren Angka PUS seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Tren pencapaian peserta KB Baru seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Tren peserta KB Aktif MKJP seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Tren Unmet Need Kabupaten Polewali mandar
- Data Basis kelompok BKB seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Data Basis kelompok BKB HI se- Kabupaten Polewali mandar
- Data Basis kelompok BKR seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar

- r. Data Basis kelompok BKL seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- s. Data Basis kelompok UPPKS seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- t. Data Basis kelompok PIK R seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- u. Jumlah Kelompok Tribina dan PIK R
- v. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan atap terluas
- w. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan dinding rumah terluas
- x. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan lantai rumah terluas
- y. Angka Kelahiran per kelompok umur (ASFR)
- z. Presentasi Angka ketidak berlangsungan pemakaian kontrasepsi Kab.Polewali mandar
- aa. Data PKB ASN Kabupaten Polewali mandar
- bb. Data PLKB ASN Kabupaten Polewali mandar
- cc. Data Kampung KB Kabupaten Polewali mandar

4. Jumlah Mitra yang terlibat dalam Program Bangga Kencana (KKBPK)

Tabel 3.4
Gambaran Umum Petugas PPKBD dan Sub PPKBD
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

Keadaan Umum

NO	URAIAN	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH LAPOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan	16	16
2	PPLKB / Petugas KB Kecamatan	19	19
3	Desa/Kelurahan	167	167
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	106	106
5	P P K B D	167	167
6	Sub P P K B D	728	728
7	Kelompok KB	66	66
8	Kelompok Kegiatan BKB	98	98
9	Kelompok Kegiatan BKR	17	17
10	Kelompok Kegiatan BKL	33	33
11	Kelompok Kegiatan UPPKA	49	49
12	Jumlah PIK R/M	25	25
	a. Jumlah PIK R/M Tumbuh	23	23
	b. Jumlah PIK R/M Tumbuh	2	2
	c. Jumlah PIK R/M Tumbuh	0	0

Tabel 3.5
Daftar Nama Kampung KB dan Rumah Data yang dibentuk Tahun 2024

5. Jumlah Rumah Data Kampung KB yang dibentuk

NO	NAMA KAMPUNG KB	KECAMATAN	RUMAH DATA
----	-----------------	-----------	------------

1	Polewali	Polewali	Ada
2	Takatindung	Polewali	
3	Madatte	Polewali	
4	Manding	Polewali	Ada
5	Sulewattang	Polewali	
6	Tonyaman	Binuang	Ada
7	Kunyi	Anreapi	Ada
8	Duampanua	Anreapi	Ada
9	Tonrolima	Matakali	Ada
10	Bunga bunga	Matakali	Ada
11	Indo Makombong	Matakali	Ada
12	Patampanua	Matakali	Ada
13	Tumpiling	Wonomulyo	Ada
14	Nepo	Wonomulyo	
15	Sidorejo	Wonomulyo	Ada
16	Jambu Malea	Tapango	Ada
17	Bussu	Tapango	
18	Buku	Mapili	
19	Sattoko	Mapili	
20	Kurma	Mapili	
21	Pulliwa	Bulo	Ada
22	Mambu Tapua	Matangnga	
23	Tapua	Matangnga	Ada
24	Taramanu	Tutar	
25	Taramanu Tua	Tutar	
26	Arabua	Tutar	Ada
27	Puccadi	Luyo	
28	Tenggelang	Luyo	
29	Luyo	Luyo	
30	Sumarrang	Campalagian	Ada
31	Kenje	Campalagian	Ada
32	Katumbangan Lemo	Campalagian	Ada
33	Padang Timur	Campalagian	Ada
34	Sabang subik	Balanipa	Ada
35	Lambanan	Balanipa	
36	Pambusuang	Balanipa	
37	Bala	Balanipa	Ada
38	Lego	Balanipa	Ada
39	Lekopadis	Tinambung	
40	Tangnga Tangga	Tinambung	
41	Sepabatu	Tinambung	Ada
42	Salarri	Limboro	Ada
43	Tangan Baru	Limboro	Ada
44	Sama sundu	Limboro	Ada
45	Alu	Alu	

--	--	--	--

2. Sasaran 2 : PRESENTASE PESERTA KB AKTIF

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif pada tahun 2024 sebesar 57,41% Hal ini berarti ada Kenaikan sedikit sebesar 0,45% dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 56,96% dari target 84.27% 2022 sebesar 49,59% dari target 80,99%, Hasil perhitungan semakin tinggi semakin baik. Terkait dengan perkembangan/trend realisasi cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif tahun 2019-2024, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

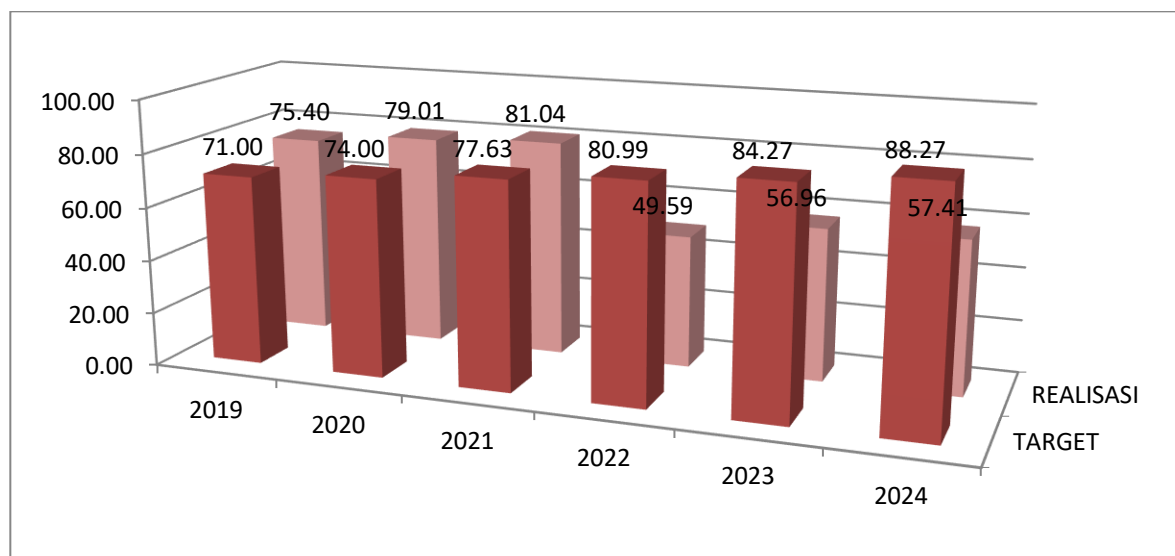
Tabel 3.6

Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	71,00	75,40	106,20%
2020	74,00	79,01	106,77%
2021	77,63	81,04	104,39%
2022	80,99	49,59	61,23%
2023	84,27	56,96	67,59%
2024	88,27	57,41	65,04%

Gambar 3.3

Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2024



Tabel 3.7
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
BULAN : DES - 2024

Prov : SULAWESI BARAT

Kab : POLEWALI MANDAR

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	KESERTAAN JAMINAN KESEHATAN				TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
			JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)			NON JKN	
			JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
01	TINAMBUNG	2984	1700	676	2376	24	564
02	CAMPALAGIAN	8114	4844	762	5606	61	2447
03	WONOMULYO	7172	3282	1834	5096	56	2020
04	POLEWALI	7336	3528	2151	5679	169	1488
05	TUTAR	3318	2505	147	2652	3	663
06	BINUANG	5038	3082	717	3799	26	1213
07	TAPANGO	3970	2151	536	2687	8	1275
08	MAPILLI	4363	2894	569	3463	14	886
09	MATANGGA	954	722	51	773	2	179
10	LUYO	4478	2854	330	3184	10	1284
11	LIMBORO	2253	1392	268	1660	6	587
12	BALANIPA	4195	2936	334	3270	13	912
13	ANREAPI	1744	1079	186	1265	12	467
14	MATAKALI	3728	2476	445	2921	19	788
15	ALLU	1942	1195	197	1392	2	548
16	BULO	1832	1424	54	1478	1	353
JUMLAH TOTAL		63401	38044	9257	47301	426	15674

Tabel 3.8

JUMLAH PESERTA KB AKTIF

BULAN : DES - 2024

Prov : SULAWESI BARAT

Kab : POLEWALI MANDAR

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(4-11)	13
01	TINAMBUNG	1430	768	247	77	209	24	0	103	0	1428	2
02	CAMPALAGIAN	3461	1876	705	148	459	116	0	135	9	3448	13
03	WONOMULYO	4642	2352	913	152	659	307	3	146	1	4533	109
04	POLEWALI	4236	1485	1324	283	688	199	0	246	0	4205	31
05	TUTAR	2137	899	631	33	490	10	31	38	1	2133	4
06	BINUANG	3064	1377	809	108	590	27	5	107	6	3035	29
07	TAPANGO	2530	1397	577	33	377	32	1	69	1	2487	43
08	MAPILLI	2526	1167	465	55	617	42	0	148	0	2494	32
09	MATANGGA	701	285	124	18	262	2	0	8	0	699	2
10	LUYO	2583	1342	428	98	534	31	10	89	3	2535	48
11	LIMBORO	1331	535	333	124	241	22	0	64	0	1319	12
12	BALANIPA	1957	1123	379	149	171	33	0	101	1	1957	0
13	ANREAPI	1412	383	541	45	331	23	5	62	4	1394	18
14	MATAKALI	2046	918	535	52	396	58	2	62	4	2027	19
15	ALLU	1127	463	362	28	201	6	6	31	1	1098	29
16	BULO	1219	394	383	12	398	8	0	18	0	1213	6
JUMLAH TOTAL		36402	16764	8756	1395	6629	940	63	1427	31	36005	397

JUMLAH UNMET NEED

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need. Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut *Unmet Need* dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak inginpunya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB.

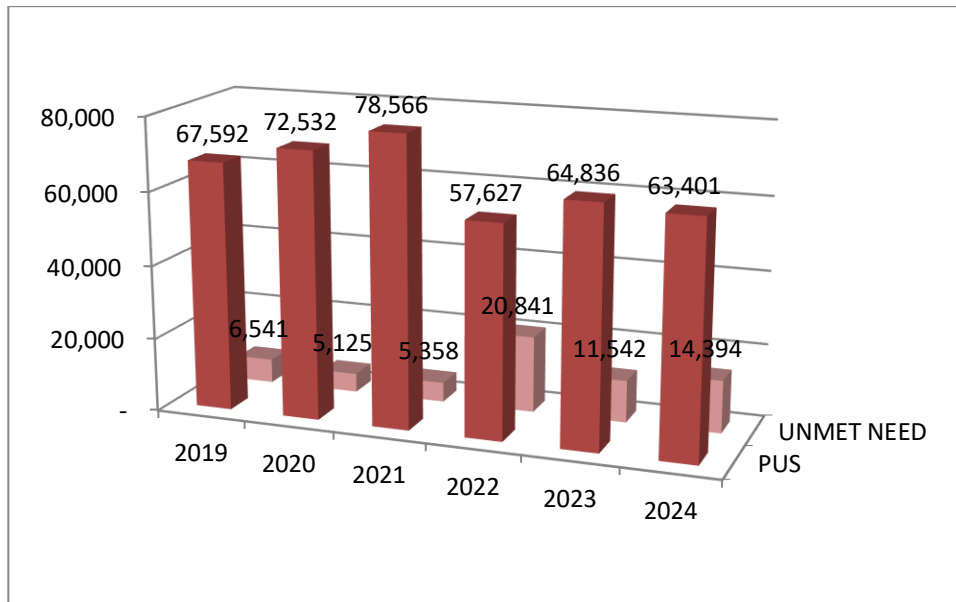
Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

Unmet Need pada tahun 2024 sebesar 14.394 terhadap PUS sebanyak 63.401 dengan capaian penurunan sebanyak 1,77% Sementara di tahun sebelumnya tahun 2023 Unmet need sebesar 11.542 terhadap PUS sebanyak 64.839 dengan capaian penurunan sebanyak 1,82%. Tahun 2022 Unmet need sebesar 20.841 terhadap PUS sebanyak 57.621 dengan capaian penurunan sebanyak 1,64%. Tahun 2021 Unmet need sebesar 5.358 terhadap PUS sebanyak 78.566 dengan capaian penurunan sebanyak 1,93%. Tahun 2020 Unmet need sebesar 5.125 terhadap PUS sebanyak 72.532 dengan capaian penurunan sebanyak 1,93%. dan di tahun 2019 Unmet need sebesar 6.541 terhadap PUS sebanyak 67.592 dengan capaian penurunan sebanyak 1,90%. Hal ini berarti dari tahun ke tahun mengalami penurunan peserta KB yang tidak terlayani karena Hasil perhitungan menyatakan **semakin menurun maka semakin baik**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 3.9
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang
Belum terlayani (Unmet Need) 2019-2024

TAHUN	PUS	UNMET NEED	CAPAIAN (%)
2019	67.592	6.541	1,90
2020	72.532	5.125	1,93
2021	78.566	5.358	1,93
2022	57.627	20.841	1,64
2023	64.836	11.542	1,82
2024	63.401	14.394	1,77

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani
(Unmet Need) Tahun 2019-2024



Tabel 3.10
JUMLAH UNMET NEED TAHUN 2024 PER KECAMATAN

PERIODE: s/d Desember 2024

WILAYAH: Kabupaten Polewali Mandar

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB				UNMET NEED		
			HAMIL		TIDAK HAMIL		UNMET NEED SPACING	UNMET NEED LIMITING	JUMLAH
			INGIN HAMIL NANTI/ KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI	INGIN ANAK NANTI/ KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI			
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10=8+9
01	TINAMBUNG	2,831	35	3	408	326	443	329	772
02	CAMPALAGIAN	7,862	40	4	1,345	1,090	1,385	1,094	2,479
03	WONOMULYO	6,829	12	4	615	943	627	947	1,574
04	POLEWALI	6,800	35	2	927	927	962	929	1,891
05	TUTAR	2,953	9	2	350	302	359	304	663
06	BINUANG	5,122	13	3	477	483	490	486	976
07	TAPANGO	3,895	14	4	262	391	276	395	671
08	MAPILLI	4,261	12	0	585	516	597	516	1,113
09	MATANGNGA	884	3	0	59	48	62	48	110
10	LUYO	4,121	24	1	489	454	513	455	968
11	LIMBORO	2,141	11	1	282	134	293	135	428
12	BALANIPA	4,030	31	2	505	332	536	334	870
13	ANREAPI	1,483	6	0	76	146	82	146	228
14	MATAKALI	3,494	20	5	257	492	277	497	774
15	ALLU	1,801	8	2	399	227	407	229	636
16	BULO	1,657	8	1	87	145	95	146	241
JUMLAH TOTAL		60,164	281	34	7,123	6,956	7,404	6,990	14,394

*Pengolahan data berdasarkan PUS yang terdata di Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran
<https://portalpk-siga.bkkbn.go.id/tabulasi/KB/Tabel15>

Tabel 3.11
PESERTA KB (AKSEPTOR) BARU

PERIODE: s/d Desember 2024

WILAYAH: Kabupaten Polewali Mandar

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	KESERTAAN BER-KB			
			PUS PESERTA KB			PUS BUKAN PESERTA KB
			MODERN	TRADISIONAL	JUMLAH PUS PESERTA KB	
1	2	3	4	5	6	7
01	TINAMBUNG	2,831	1,156	3	1,159	1,672
02	CAMPALAGIAN	7,862	2,557	31	2,588	5,274
03	WONOMULYO	6,829	3,258	48	3,306	3,523
04	POLEWALI	6,800	2,705	29	2,734	4,066
05	TUTAR	2,953	1,348	13	1,361	1,592
06	BINUANG	5,122	2,515	46	2,561	2,561
07	TAPANGO	3,895	2,061	39	2,100	1,795
08	MAPILLI	4,261	2,002	5	2,007	2,254
09	MATANGNGA	884	434	0	434	450
10	LUYO	4,121	1,768	26	1,794	2,327
11	LIMBORO	2,141	1,041	5	1,046	1,095
12	BALANIPA	4,030	1,543	34	1,577	2,453
13	ANREAPI	1,483	834	15	849	634
14	MATAKALI	3,494	1,769	5	1,774	1,720
15	ALLU	1,801	584	2	586	1,215
16	BULO	1,657	943	14	957	700
JUMLAH TOTAL		60,164	26,518	315	26,833	33,331

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran <https://portalpk-siga.bkkbn.go.id/tabulasi/IKB/Tabel9>

Akseptor KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.

Akseptor KB baru pada tahun 2024 mencapai 26.833 dan mengalami penurunan 10.288 dari tahun sebelumnya tahun 2022 mencapai 11.349 menalami penurunan 52.576 orang akseptor baru dari tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 63.925 dan di tahun 2020 mencapai 57.311 mengalami kenaikan sebanyak 6.341 akseptor. Tahun 2019 sebanyak 50.970 Akseptor.dan Akseptor KB baru pada tahun 2018 mencapai 43.973 Akseptor. dari tahun ke tahun mengalami peningkatan peserta KB Baru tapi untuk tahun 2022 mengalami penurunan. Karena Hasil perhitungan menyatakan **semakin meningkat maka semakin baik**. Tren ini menunjukkan belum maksimalnya program pembinaan dan pelayan KB di Kecamatan.

Perkembangan jumlah akseptor KB baru dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.12
Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Terhadap PUS
Tahun 2019-2024

TAHUN	PUS	JUMLAH KB BARU
2019	67.592	50.970
2020	72.532	57.311
2021	78.566	25.426
2022	57.627	14.101
2023	64.836	26.540
2024	63.401	26.833

Gambar 3.5
Grafik Perkembangan jumlah Akseptor
KB Baru Tahun 2019-2024



TABEL 3.13
JUMLAH PESERTA KB MKJP TAHUN 2024
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Prov : SULAWESI BARAT

Kab : POLEWALI MANDAR

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU	METODE KONTRASEPSI MKJP				
			IMPLAN		IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI
			1 BATANG	2 BATANG			
1	2	3=Σ (4-14)	10	11	12	13	14
01	TINAMBUNG	1	0	1	0	0	0
02	CAMPALAGIAN	7	0	6	1	0	0
03	WONOMULYO	20	0	13	6	0	1
04	POLEWALI	44	0	11	10	0	23
05	TUTAR	1	0	1	0	0	0
06	BINUANG	25	0	25	0	0	0
07	TAPANGO	9	0	9	0	0	0
08	MAPILLI	7	0	6	1	0	0
09	MATANGNGA	1	0	1	0	0	0
10	LUYO	1	0	1	0	0	0
11	LIMBORO	3	0	3	0	0	0
12	BALANIPA	1	0	1	0	0	0
13	ANREAPI	1	0	0	1	0	0
14	MATAKALI	0	0	0	0	0	0
15	ALLU	0	0	0	0	0	0
16	BULO	1	0	1	0	0	0
Jumlah Total		122	0	79	19	0	24

PUS peserta KB aktif MKJP adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meliputi :

1. MOW (Metode operasi Wanita) atau Tubektomi (tutup kandungan).
2. MOP (Metode Operasi) Pria atau Vasektomi
3. Implan atau Susuk KB dan
4. IUD atau Spiral AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

Peserta KB aktif MKJP adalah jumlah peserta KB aktif MKJP dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif MKJP adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi MKJP ditambah dengan jumlah peserta KB baru MKJP pada tahun berjalan.

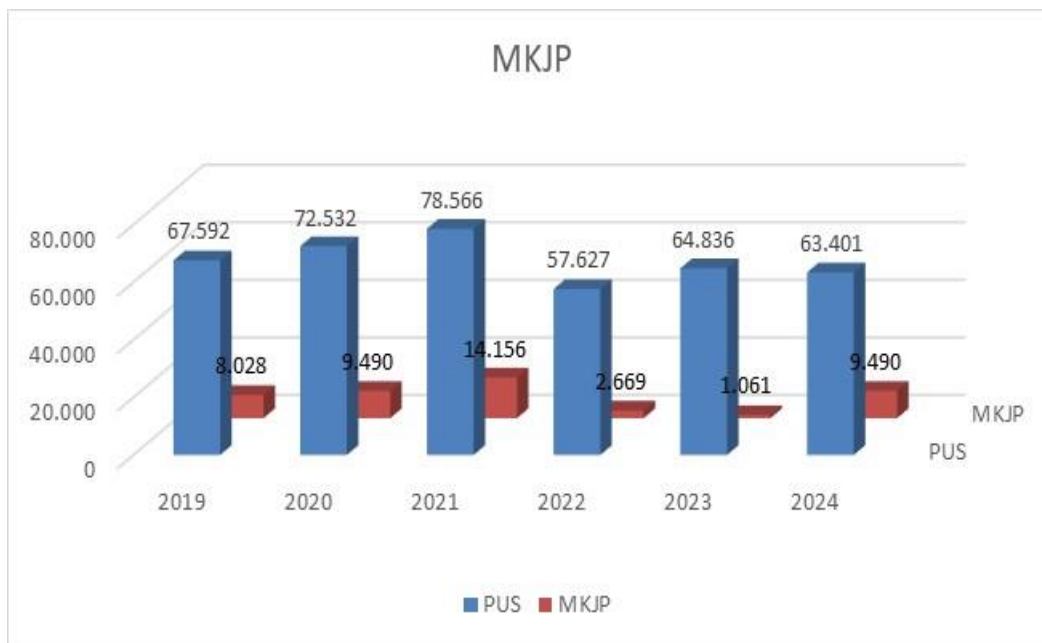
Peserta KB aktif MKJP pada tahun 2023 sebanyak 1.061 akseptor mengalami penurunan sebanyak 1.608 akseptor dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebanyak 2.669 orang mengalami penurunan sebanyak 11.487 orang dari tahun sebelumnya di tahun 2021 sebanyak 14.156 dan di tahun

2020 sebanyak 9.490 Akseptor. Pada Tahun 2019 sebanyak 8.028 Akseptor dari tahun sebelumnya 2018 sebanyak 6.393 Akseptor. Hal ini menunjukkan tren kenaikan tapi menunjukkan penurunan di tahun 2022 karena belum maksimalnya Penggerakan dan Penyuluhan di Lini lapangan. Hasil perhitungan angka **semakin tinggi semakin baik**. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 3.14
Perkembangan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP) Terhadap PUS Tahun 2019-2024

THN	PUS	MKJP	CAPAIAN
2019	67.592	8.028	0,12
2020	72.532	9.490	0,13
2021	78.566	14.156	0,18
2022	57.627	2.669	0,05
2023	64.836	1.061	0,02
2024	63.401	9.490	0,15

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Terhadap PUS
Tahun 2019-2024



PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA/PENYULUH KB (PLKB/PKB)

PLKB/PKB adalah petugas BKKBN berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan Program Bangga Kencana (KKBPK).

Masing-masing bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan dan memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program

Kependudukan Keluarga Berencana bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan di tingkat desa/kelurahan.

Status kepegawaian PKB/PLKB dapat dianalogikan sebagai orang yang pergi dan pulang (PP). Semula berstatus sebagai pegawai pusat (vertikal) dan setelah adanya otoda maka jabatan ini masuk dalam formatur PNS Pemkab tetapi sejak tahun 2017 statusnya dikembalikan ke PNS Pusat dibawah naungan BKKBN

PLKB yang ada di daerah/Kabupaten, diberdayakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar. PKB/PLKB ini mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB di Lapangan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penggerakan di lapangan ini dilaporkan ke Pusat melalui BKKBN Perwakilan provinsi Sulawesi Barat.

Jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten polewali Mandar sudah cukup memadai sebanyak 23 PNS dan PPPK 83 Semenjak awal tahun ditambah sebanyak 62 orang PLKB dari Formasi PLKB PPPK Pengangkatan tahun 2021 dan 2022 15 orang jadi total PLKB yang ada di Polewali mandar saat ini adalah 106 orang

Kurangnya tenaga penyuluh KB sudah berlangsung sejak dimulainya era desentralisasi pada tahun 2003. Saat itu, penyuluh KB di Indonesia mencapai 26 ribu. Namun, saat ini hanya 15 ribu orang.

Jumlah desa dan Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar adalah 167 sementara PLKB sekarang sejumlah 106 orang. Dari jumlah tersebut sudah bisa dikatakan bahwa rasio 1:2 telah tercukupi untuk Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 di semua wilayah kerja Kecamatan sudah terisi Koordinator PLKB sehingga yang jumlahnya 16 orang. Dengan Asumsi bahwa setiap penyuluh KB membawahi 2 Desa/kelurahan sudah mencukupi rasio petugas KB di kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 167.

Tabel 3.15
Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB)
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PPLKB/Koordinator	16	16	16	16	16	16
2	PKB/PLKB	4	3	7	64	88	90
Jumlah		23	20	23	82	104	106

Tabel 3.16

Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2024

Kab : POLEWALI MANDAR

No.	KECAMATAN	JUMLAH PKB	JENIS KELAMIN		KELOMPOK UMUR					JABATAN						
			LAKI LAKI	PEREM PUAN	≤ 25	26 – 35	36 – 45	46 – 55	56 – 60	TERA MPIL	MAHIR	PENYE LIA	PERTA MA	MUDA	MADY A	UTAM A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	TINAMBUNG	6	2	4	0	3	1	2	0	2	0	0	3	0	1	0
02	CAMPALAGIAN	9	0	9	0	3	5	1	0	2	0	0	5	2	0	0
03	WONOMULYO	7	2	5	0	6	0	1	0	3	0	0	3	1	0	0
04	POLEWALI	9	2	7	0	2	5	2	0	2	0	0	6	0	1	0
05	TUTAR	5	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0
06	BINUANG	8	1	7	0	3	3	1	1	2	0	0	5	0	1	0
07	TAPANGO	7	3	4	0	5	2	0	0	3	0	0	3	1	0	0
08	MAPILLI	8	1	7	0	4	2	1	1	4	0	0	3	1	0	0
09	MATANGNGA	4	1	3	0	3	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0
10	LUYO	8	3	5	0	6	1	1	0	2	0	0	6	0	0	0
11	LIMBORO	9	3	6	0	5	3	1	0	3	0	0	4	1	1	0
12	BALANIPA	6	0	6	0	2	3	1	0	3	0	0	2	0	1	0
13	ANREAPI	3	1	2	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0
14	MATAKALI	7	5	2	0	1	2	4	0	2	0	0	3	2	0	0
15	ALLU	6	1	5	0	4	2	0	0	3	0	0	3	0	0	0
16	BULO	4	2	2	0	1	2	1	0	1	0	0	3	0	0	0
JUMLAH TOTAL		106	32	74	0	52	36	16	2	33	1	0	58	8	6	0

Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator *kebutuhan dasar keluarga* (basic needs). Indikator tahapan KS I atau indikator *kebutuhan dasar keluarga* (basic needs), yaitu : (1) Pada umumnya anggota keluarga *makan dua kali* sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki *pakaian yang berbeda* untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai *atap, lantai dan dinding* yang baik, (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa *ke sarana kesehatan*, (5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi *ke sarana pelayanan kontrasepsi* dan (6) *Semua anak umur 7 – 15 tahun* dalam keluarga *bersekolah*. Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak mampu memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator KS II atau indikator *kebutuhan psikologis* (psychological needs) keluarga. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator *kebutuhan psikologis* (psychological needs) keluarga, yaitu : (1) Pada umumnya anggota keluarga *melaksanakan ibadah* sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga *makan daging/ikan/telur*, (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang *satu stel pakaian baru* dalam setahun, (4) *Luas lantai rumah* paling kurang *8 m²* untuk setiap penghuni rumah, (5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam *keadaan sehat* sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing, (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang *bekerja untuk memperoleh penghasilan*, (7) Seluruh anggota keluarga umur *10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin*, (8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih *menggunakan alat/obat kontrasepsi*.

BKKBN hanya melaksanakan pendataan pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Tidak melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi kemiskinan atau menurunkan persentase keluarga

pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Melakukan pemantauan terhadap pendataan keluarga dan pelatihan bagi pendata (PPKBD/Sub PPKBD), hal yang diambil sehingga pendataan menghasilkan data yang akurat.

Kendala-kendala tersebut Pembangunan Bangsa Kencana di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

- a. Peserta KB aktif dari tahun ke tahun masih didominasi perempuan, kesertaan ber-KB laki-laki masih kurang;
- b. Peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang;
- c. Kurangnya advokasi, konseling dan penyuluhan tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- d. Kurangnya tenaga terlatih untuk kontrasepsi MKJP;
- e. Kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB;

Langkah-langkah yang diambil oleh DP2KBP3A, adalah :

- Melakukan advokasi melalui motivator KB pria.
Motivator KB pria merupakan seseorang yang telah menjadi peserta KB pria yaitu vasektomi. Motivator tersebut mengajak orang lain untuk ikut dengan menceritakan pengalaman yang dirasakan setelah di vasektomi.
Akhirnya, pada tahun 2018, Kabupaten Polewali Mandar menjadi Terbaik I pencapaian KB Pria melalui Vasektomi terbanyak di Kecamatan Tutar dan Luyo Motivator KB Pria Terbaik.
- Melakukan pelayanan gratis baik secara mobile (melalui mobil pelayanan) maupun statis di puskesmas dan pengadaan alat kontrasepsi MKJP;
- Melakukan advokasi melalui pemutaran film tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- Melakukan advokasi dan penyuluhan bahwa program KB bukan hanya alat kontrasepsi atau kuantitas penduduk tetapi juga menyangkut kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga;
- Mengusulkan bidan atau dokter untuk mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi khususnya MKJP;
- Guna mengantisipasi kurangnya penyuluh KB, maka diangkat PLKB Sukarela dan untuk meningkatkan kualitasnya diikutkan LDT (Latihan Dasar Tehnis) khusus Non PNS yang dilaksanakan oleh BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat

KEGIATAN OPERASIONAL TIM KB KELILING (TKBK)

Gambar 3.7

Tim KB Keliling Kabupaten Polewali Mandar



TKBK merupakan suatu kegiatan dalam bentuk pelayanan KB secara gratis kepada warga dan menjadi salah-satu upaya jitu mengendalikan tingkat kelahiran penduduk. Dalam pelayanannya, DP2KBP3A menyediakan secara gratis alat KB berupa pemasangan pemasangan Intra Uterin Device (IUD), Implant / Susuk KB, Suntik dan Pil. Dalam kegiatan itu pula diberikan pemahaman mengenai perencanaan keluarga secara baik. Perencanaan keluarga ditujukan agar keluarga dapat menjadi keluarga sejahtera dan masing-masing anak mendapat perhatian serta kasih sayang yang seharusnya dari orangtua.

Penggunaan alat kontrasepsi turun sampai 47 persen selama pandemi. Kondisi itu dapat membuat angka kehamilan yang tidak direncanakan meningkat sehingga terjadi ledakan penduduk. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut, dibanding tahun 2019, terjadi penurunan lebih dari satu juta layanan Keluarga Berencana (KB) selama Januari – Desember 2024. Itu sebabnya, masa normal baru setelah meredanya pandemi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali pelayanan KB. “Pemerintah sudah berkomitmen menggencarkan kembali program KB untuk menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia tumbuh seimbang. Namun, selama pandemi kita melihat penurunan partisipasi KB cukup besar,” kata Kepala BKKBN, dr.Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam acara webinar “Urgensi Pelayanan KB pada Masa New Normal”. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan program KB yang selama ini mengandalkan kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian layanan kontrasepsi.

Selama masa pandemi muncul kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan KB di klinik bidan (Bidan Praktek Mandiri) atau dokter yang ada di Klinik KB yang tersebar diseluru wilayah. Di bawah ini adalah uraian pelayanan Operasional TKBK di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan frekwensi di Masa Pandemi tahun2021

Tabel 3.17
Frekwensi Operasional Tim KB Keliling
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)
1	Frekuwensi Operasional Mupen Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
2	Frekwensi Rakor Program KB Tingkat Desa/Kabupaten	16	15	15	16	16	16

3	Frekwensi Rakor program KB tingkat Kabupaten/Desa	140	123	123	123	123	123
4	Frekwensi penyuluhan oleh PLKB/PKB	143	134	143	134	134	134
5	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE KB	130	118	107	118	118	118
6	Jumlah tokoh masyarakat/agama/adat yang aktif membuka KIE KB	34	27	40	27	27	27
7	Frekwensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/kelurahan	100	82	62	82	82	82
8	Frekwensi Operasional Gerak Muyan KB dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	0	0	0	0	0	0

PEMBINAAN TRIBINA

Pembinaan ketahanan keluarga berbasis Tribina yaitu BKB, BKR, BKL dikampung kb yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di Polewali Mandar. Pembinaan atau sosialisasi kelompok tribina bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader tentang tribina yang meliputi Bina Keluarga balita, bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia dimana acara ini berlangsung menjelaskan tentang tujuan, fungsi dan manfaat dari dibentuknya tribina tersebut. dan diharapkan para kader memahami bagaimana mengisi data dalam buku tribina dan dapat memberikan penyuluhan dengan baik serta tepat sasaran.

Adapun kegiatan ini memberikan informasi kepada kader-kader tribina, diantara nya :

BKB : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKB

BKR : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKR

BKL : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKL

Dengan demikian para peserta dan kader dapat mengetahui secara rinci tentang kegiatan tribina dan dapat membantu bekerjasama dalam kegiatan program KB.

1. Cakupan sasaran anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup balita (anak usia 0-5 tahun) dan keluarganya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, gizi, dan pendidikan balita, serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat dan mengasuh balita.

Tujuan BKB:

1. Meningkatkan status kesehatan balita
2. Meningkatkan status gizi balita
3. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat dan mengasuh balita

4. Meningkatkan akses balita terhadap pendidikan dan kesehatan

Sasaran BKB:

1. Balita (anak usia 0-5 tahun)
2. Keluarga yang memiliki balita
3. Masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki tingkat kesulitan hidup yang tinggi

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) adalah seluruh keluarga yang memiliki balita (anak usia 0-5 tahun) yang tinggal di suatu wilayah atau desa/kelurahan.

Berikut adalah kriteria anggota BKB:

1. Keluarga yang memiliki balita (anak usia 0-5 tahun)
2. Keluarga yang tinggal di suatu wilayah atau desa/kelurahan yang telah ditentukan sebagai sasaran program BKB
3. Keluarga yang bersedia dan mampu mengikuti kegiatan BKB

Anggota BKB dapat terdiri dari:

1. Ibu balita
2. Ayah balita
3. Keluarga inti (suami, istri, dan anak-anak)
4. Keluarga luas (kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain)

Dalam pelaksanaan program BKB, anggota keluarga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti:

1. Pertemuan rutin BKB
2. Pelatihan dan edukasi tentang kesehatan, gizi, dan pendidikan balita
3. Kegiatan pengembangan kemampuan keluarga dalam merawat dan mengasuh balita

Dengan demikian, anggota BKB dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, gizi, dan pendidikan balita.

Tabel. 3.18
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita ber-KB Tahun 2019-2024

I. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKB

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	5326	3521	5321	5317	5317	5317
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	4262	4262	4249	4249	4249	4249
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	3330	3330	3330	3339	3339	3339

4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	3655	3655	3655	3655	3655	3655
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	2883	2783	2783	2783	2783	2783
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	3223	3248	3248	3228	3228	3228
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	2533	2433	2433	2433	2433	2433
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	88	90	88	88	88	88
9	Jumlah anggota yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KAA	2078	2002	2002	2045	2045	2045

Sasaran anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spritual.

Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja.

Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja.

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKR terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Tahun 2024 belum ada peningkatan sama sekali dan terlihat Stagnan dengan tahun 2023 yang mengalami peningkatan yang bagus karena capaiannya melampaui dari tahun sebelumnya di tahun 2020 dan 2019. Karena asumsinya mengatakan perkembangan yang semakin tinggi semakin baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel. 3.19
Perkembangan Anggota Bina Keluarga Remaja
ber-KB Tahun 2019-2024

II. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKR

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	1129	1144	1144	781	781	781
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	693	693	693	423	423	423
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	445	445	445	290	290	290
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	595	595	595	362	362	362
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	524	523	523	314	314	314
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	500	488	488	340	340	340
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	454	454	454	307	307	307
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	17	17	17	15	15	15

3. Sasaran anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa meningkat.

BKL mempunyai dua sasaran, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsungnya adalah keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga yang semua anggotanya merupakan kaum lansia. Sedangkan sasaran tidak langsungnya, yang pertama adalah perorangan seperti guru, ulama atau pemuka agama, tokoh adat, pemuda, pemimpin organisasi dan para ahli yang memiliki ketrampilan di bidang psikolog, perawatan, kebidanan, dan dokter. Kemudian, yang kedua adalah lembaga pemerintah maupun swasta, seperti sekolah, organisasi perempuan, dan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pembinaan anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKL terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Pada tahun 2023 ini jumlah anggota BKL masih mengalami Stagnasi dari tahun sebelumnya di tahun 2022 stagnasi ini disebabkan banyak regulasi dan system pelaporan mengalami perubahan padahal penyuluhan ditingkat kecamatan sudah sedemikian dilakukan. Tapi tahun 2020 capaiannya melampaui dari tahun sebelumnya di tahun 2019 dan 2018. Karena asumsinya mengatakan perkembangan yang **semakin tinggi semakin baik**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.20
Perkembangan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB Tahun 2019-2024

III. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKL

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	1567	1567	1380	1084	1084	1084
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	1300	1315	1128	856	856	856
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	590	590	580	407	407	407
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	936	940	832	627	627	627
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	788	795	730	556	556	556
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	835	824	727	585	585	585
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	705	677	612	529	529	529
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	18	18	18	18	18	18

IV. PEMBINAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA (UPPKA)

Gambar 3.8

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA



UPPKA adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga Akseptor yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

Tujuan UPPKA:

1. Mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif
2. Mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga
3. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga
4. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Anggota UPPKA:

1. Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Peserta Keluarga Berencana (KB)
3. Remaja
4. Lanjut usia

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berupaya mendukung, mengajak, memfasilitasi dan mendampingi para anggotanya dalam memanfaatkan segala sumber daya lokal (bahan baku, keahlian / kemampuan anggota, permintaan pasar, sumber pembiayaan dan lain-lain) untuk kegiatan pembelajaran serta meningkatkan kegiatan ekonomi produktif.

Pembinaan PUS peserta KB menjadi anggota usaha peningkatan dan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKA) pada tahun 2022 ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2021. Ini seperti halnya tidak adanya upaya sama sekali PLKB dalam meningkatkan capaian padahal segala macam sarana dan prasarana telah disiapkan dan tinggal di aplikasikan. Penurunan terjadi sejak tahun sebelumnya di tahun 2020 dan 2019 karena Pandemi Covid19 tapi dengan membaiknya situasi diharapkan akan meningkat ditahun tahun mendatang tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Untuk perkembangannya bisa dilihat di table berikut ini.

Tabel. 3.21
Perkembangan Pembinaan PUS Peserta KB
Menjadi Anggota UPPKA Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota yang menjadi kelompok UPPKA :						
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKA	855	838	838	720	720	720
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKA KPS dan KS I	674	659	659	630	630	630
2	Status KB anggota kelompok UPPKA:						

	a. Anggota dari seluruh anggota tahapan KS						
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKA yang status PUS	572	552	552	540	540	540
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKA yang status PUS ber KB	433	415	415	405	405	405
	b. Anggota dari tahapan KPS dan KS I						
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKA KPS dan KS I yang status PUS	469	451	451	437	437	437
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKA KPS dan KSI yang status PUS ke KB	357	340	340	328	328	328
3	Jumlah pertemuan anggota UPPKA	26	22	22	27	27	27

Pembinaan PUS berusia < 20 tahun (PUSMUPAR)

Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 - 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun (PUSMUPAR) , antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun. Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 5,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.

Cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Ini juga disebabkan karena kurangnya upaya advokasi dan KIE program KKB oleh petugas lapangan KB. Tujuan program PUSMUPAR adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Meningkatkan akses dan pemanfaatan kontrasepsi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.

4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi suami dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Program PUSMUPAR biasanya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan seperti:

1. Konseling keluarga berencana
2. Pemberian informasi tentang kontrasepsi
3. Pemberian kontrasepsi
4. Pelayanan kesehatan reproduksi
5. Pelatihan dan pendidikan untuk suami dan istri

Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa

Gambar 3.9

Pusat Informasi Konseling Remaja



Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Ruang lingkup PIK Remaja meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi KRR,

Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat remaja.

PIK Remaja dapat melayani remaja lainnya yang berada di luar lokasi wilayah administrasinya. PIK Remaja dalam penyebutannya bisa dikaitkan dengan tempat dan institusi pembinaanya seperti PIK Remaja Sekolah, PIK Remaja Masjid, PIK remaja Pesantren, dan lain-lain. Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik sebaya dan konselor sebaya.

Kelompok PIK Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-Mahasiswa) adalah suatu wadah kegiatan program KKB yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana termasuk Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Tujuan umum dari PIK Mahasiswa adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi mahasiswa. Sedangkan tujuan khususnya antara lain:

- 1) membentuk Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) di kampus;
- 2) meningkatkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) dari tahap Tumbuh menjadi tahap tegak dan tahap Tegar;
- 3) Mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) sebagai pusat unggulan (center of excellence) Ruang lingkup PIK Mahasiswa meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi PKBR, TRIAD KRR (Seksualitas, Npsza, HIV dan AIDS), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat mahasiswa.

Pengelola PIK Mahasiswa adalah mahasiswa yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Mahasiswa serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau pihak lain. Pengelola PIK Mahasiswa terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya.

Realisasi Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Terkendalnya Laju
Pertumbuhan Penduduk dan Peserta KB Aktif Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pembinaan Keluarga Berencana	6,436,971,000	4,910,612,390	76,29
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	840,000,000	582,050,222	69.29
Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1,014,400,000	667,172,310	66.77
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240,000,000	239,519,800	99.80
Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	601,000,000	501,000,000	83,36
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150,200,000	141,534,472	94.23
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	123,400,000	89,756,400	72.74
Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	803,064,000	398,570,668	49,63
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,764,957,000	1,656,212,018	93,84
Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	120,700,000	21,120,500	17,50

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	779,250,000	613,676,000	78,75
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,864,800,000	1,243,200,000	66,67
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1,864,800,000	1,243,200,000	66,67
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	506,000,000	420,881,383	83,18
Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	250,000,000	230,635,000	87,03
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,000,000	27,235,000	45,39
Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	181,000,000	163,011,383	90,06

Walaupun sebagian besar indikator di sasaran 2 ini telah melampaui target, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS sulit berkembang karena kekurangan dana pembinaan terkhusus insentif untuk kader;

2. Pusat Informasi Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK R/M) juga masih sulit untuk berkembang malahan sebagian besar kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif:
3. Pernikahan Usia Anak masih tinggi yang berarti pendewasaan usia pernikahan belum terlalu dipahami oleh masyarakat.

Hal-hal yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan dan kendala-kendala, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kerjasama dan dukungan dari stakeholder atau instansi terkait mulai dari tingkat Desa dan Kabupaten;
- Mengintegrasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan instansi terkait;
- Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok dan kader;
- Selain itu, upaya dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, yaitu melalui: (1) Peningkatan akses informasi tentang pendewasaan usia pernikahan, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dengan melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pedoman, advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan bentuk fasilitasi lainnya, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, PUG dilakukan melalui perencanaan dan kebijakan berperspektif gender organisasi dan institusi. Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu : pendampingan penganggaran dan perencanaan responsif gender (PPRG) ke SKPD dan pelaksanaan evaluasi PUG untuk mengetahui sejauhmana kelembagaan PUG telah memenuhi prasyarat PUG guna predikat Kabupaten peraih “Anugerah Parahita Ekapraya (APE)”

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024 Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.23
Indikator Capaian Kinerja Membaiknya Indeks Pembangunan
dan Pemberdayaan Gender Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Capaian IPG	93.07%	92.14%	99,43

Bidang yang bertugas untuk mewujudkan sasaran 2.1 adalah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

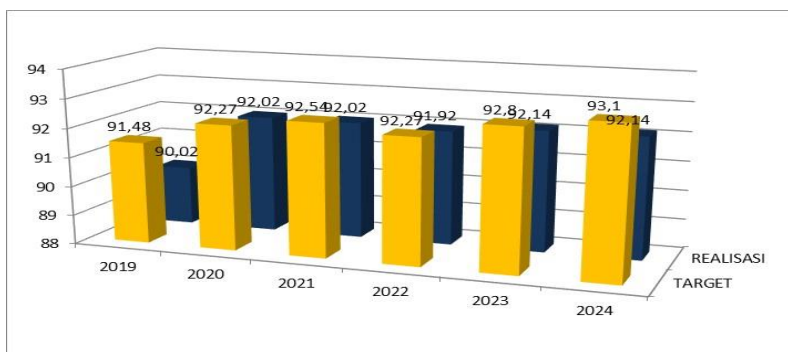
IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Capaian IPG Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2022 ini, target 92,54% realisasi 92,02% capaian 99,43%. Data ini diperoleh dan diolah oleh BPS Pusat dengan menggunakan sistem atau aplikasi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel. 3.24
Perkembangan Target dan Realisasi Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	91,48	90,02	0,98
2020	92,27	92,02	1,00
2021	92,54	92,02	0,99
2022	92,27	91,92	1,00
2023	92,8	92,14	0,99
2024	93,1	92,14	0,99

Gambar 3.10

Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2024



Kendala dan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya data pendukung dan pengetahuan dalam menghitung, sehingga menunggu data dari BPS.

Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu memfasilitasi unit layanan terpadu (P2TP2A), melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi dan advokasi.

PREDIKAT KABUPATEN LAYAK ANAK

Terbentuknya kabupaten layak anak (KLA) diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dalam undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan diperkuat dengan perpres no. 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten layak anak.

Mewujudkan kabupaten layak anak di provinsi sulawesi barat merupakan misi bapak gubernur sulawesi barat dalam misi 1 poin 7 yaitu mewujudkan 6 kabupaten menjadi kabupaten layak anak.

Tahun 2021 di provinsi sulawesi barat 2 kabupaten telah memperoleh penghargaan yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten majene, 4 kabupaten lain yaitu kabupaten mamuju, mamuju tengah, pasangkayu dan mamasa sudah kategori tahap inisiasi yang selangkah lagi akan meraih penghargaan.

Pada kesempatan yang HUT Sulbar ke 17 Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar memberikan penyerahan penghargaan KLA Kategori Pratama untuk Kabupaten Majene dan Polewali Mandar atas komitmennya melakukan percepatan KLA di wilayahnya.

Gambar 3.11
Penganugerahan Piagam Predikat KLA Tingkat Pratama



Gambar 3.12
Predikat kabupaten Layak Anak



Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

Tujuan Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan tujuan secara khusus adalah Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Prinsip dalam Pengembangan KLA

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Tata Pemerintahan Yang baik

Strategi Pengembangan KLA

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Gambar 3.13

Aspek Pemenuhan Kabupaten Layak Anak



Tabel 3.25

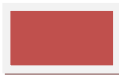
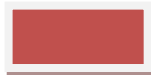
Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	Madya	Pratama	0%

Gambar 3.14

Gambar Piala Tingkatan Indikator Kabupaten Layak Anak



				
PRATAMA	MADYA	NINDYA	UTAMA	KLA
300-400+	600-700	700-800	800-900	900-1000

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan sangat dekat dengan sejak usia dini kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai kekerasan verbal, kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja dan tidak mengenal jenis kelamin, seks, ras, dan golongan.

Cakupan pelayanan kesehatan terhadap tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan/atau di RS. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih.

Tabel. 3.26

DATA KEKERASAN PEREMPUAN

PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024

WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KODE	KECAMATAN	BENTUK KEKERASAN										JUMLAH		TOTAL
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EXPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	BINUANG													0
02	POLEWALI													0
03	MATAKALI													0
04	ANREAPI													0
05	WONOMULYO	1												1
06	MAPILLI													0
07	CAMPALAGIAN													0
08	BALANIPA													0
09	TINAMBUNG													0
10	LIMBORO													0
11	ALU													0
12	LUYO	1												1
13	TAPANGO													0
14	BULO													0
15	TUTAR													0
16	MATANGNGA													0
JUMLAH TOTAL		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Tabel 3.27

DATA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024

WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	KECAMATAN	BENTUK KEKERASAN										JUMLAH		TOTAL
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EXPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	BINUANG													0
02	POLEWALI		1											1
03	MATAKALI													0
04	ANREAPI													0
05	WONOMULYO													0
06	MAPILLI													0
07	CAMPALAGIAN													0
08	BALANIPA													0
09	TINAMBUNG													0
10	LIMBORO													0
11	ALU													0
12	LUYO													0
13	TAPANGO													0
14	BULO													0
15	TUTAR													0
16	MATANGNGA													0
JUMLAH TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabel. 3.28

DATA KEKERASAN ANAK
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024

KODE	KECAMATAN	FISIK		JML	PSIKIS		JML	SEKSUAL		JML	PENELANTARAN		JML	LAINNYA		JML	JUMLAH		TOTAL
		L	P		L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	BUINUNAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	POLEWALI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
03	MATAKALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ANREAPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	WONOMULYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	MAPILLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	CAMPALAGIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	BALANIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	TINAMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LIMBORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	LUYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TAPANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	TUTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MATANGNGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

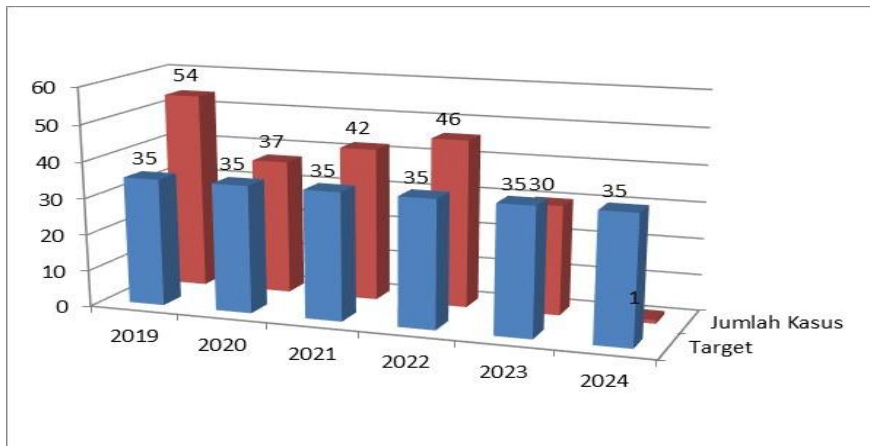
Jumlah korban kekerasan anak yang mendapat layanan kesehatan di tahun 2024 ini Data Kekerasan terhadap anak baru yang diterima dari Kepolisian Resor Polewali Mandar baru 1 Kasus. Kekerasan Terhadap Perempuan 2 kasus dan KDRT 1 kasus. Pada Tahun 2023 Kerasa Anak sejumlah 30 Kasus, Kekerasan terhadap Perempuan 7 Kasus dan KDRT sebanyak 2 Kasus Hal ini menunjukkan adanya kenaikan ditingkat kriminalitas terhadap Anak sementara diharapkan bahwa kasus kekerasan anak ini dapat turun dari tahun ke tahun dengan adanya pendampingan dari Bidang PPPA. Dari semua Kasus Anak yang ada dapat diselesaikan semua tanpa hambatan berkat kerja sama yang baik antar petugas P2TP2A. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.29

Tingkat Kasus Kekerasan Anak Tahun 2024

TAHUN	TARGET	JUMLAH KASUS	CAPAIAN
2019	35	54	0,46
2020	35	37	0,94
2021	35	42	0,80
2022	35	46	0,69
2023	35	30	1,14
2024	35	1	1,97

Gambar 3.15
Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2019-2024



Dalam upaya pencapaian target indikator membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3.30
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pemberdayaan Perempuan	256.812.000	237.973.600	92,66
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	6,812,000	6,812,000	100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000	230,635,000	87,03
Program Perlindungan Anak	92,991,000	91.509.800	98,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	19,719,400	19,603,200	99,41
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73,271,600	71,906,600	98,14
	349.803.000,-	329.483.400,-	99,92

5. **Sasaran 5** : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Setjen Wantannas secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh Setjen Wantannas. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survey berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat, dalam hal ini para stakeholder Setjen Wantannas dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelaksanaan survey IKM yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas yang merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan public.

Untuk Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 ini mendapat IKM dengan Prestasi **BAIK**

6. **Sasaran 6** : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada Perangkat Daerah. Data dari luar Perangkat Daerah juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kabupaten Polewali mandar di Tahun 2024 mendapatkan nilai **BB** dalam penilaian Sakip dari Target yang ditetapkan yaitu Nilai **A**

ANALISA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Tabel 3.31

ANALISA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN TAHUN 2024										
No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Capaian %	Nama Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM); Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah; Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah	Indeks	93,1 Indeks	93,1 Indeks	100	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	256.812.000	237.973.600	93
II	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	KLA Predikat	Pratama	Pratama	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	92.991.000	91.509.800	98
III	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	• Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor • Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.126.646.292	2.096.987.852	99
IV	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,72 Persen	0,25 Persen	33	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	506.000.000	420.881.383	83
V	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB aktif	Persen	88,27 Persen	88,27 Persen	33,36	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.436.971.000	4.910.612.390	76
VI	Meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	88,27 Persen	88,27 Persen	100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.864.800.000	1.243.200.000	67

Tabel 3.32

Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024									
No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Ket.
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan								
I	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,1 Indeks	93,1 Indeks	100	256.812.000	237.973.600	92,66	7,34	Program Pengarusuteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak								
II	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA	Pratama	20	92.991.000	91.509.800	98,41	1,59	Program Pemenuhan Hak Anak
	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah				2.126.646.292	2.096.987.852	98,61		
III	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	BB	100					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100					
2	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat baik	baik	100					
	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk								
IV	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,72 Persen	0,25 Persen	34,72	506.000.000	420.881.383	83,18		Program Pengendalian Penduduk
	Meningkatnya peserta KB aktif								
V	Persentase peserta KB aktif	88,27 Persen	88,27 Persen	33,36	6.436.971.000	4.910.612.390	76,29		Program Pembinaan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera								
VI	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	88,27 Persen	88,27 Persen	100,0	1.864.800.000	1.243.200.000	66,67		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Mencermati rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 79,77 % serta capaian kinerja keuangan sebesar 100%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 20,33%

7. Sasaran 7 : Opini Pengelolaan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Di tahun 2024 ini Kabupaten Polewali mandar mendapatkan Opini Audit **WTP** (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sesuai dengan target yang dicanangkan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagaimana dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 adalah :

- **Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.676.044.652,-**
- **Belanja Langsung : Rp. 9.608.175.640,-**
- Total : Rp. 11.284.220.292,-**

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024, dapat dilihat dari uraian dan tabel per sasaran berikut :

Tabel. 3.33
Akuntabilitas Keuangan Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat					
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga				
Persentase Peserta KB Aktif	Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	840,000,000	582,050,222	69.29
Persentase Peserta KB Aktif	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1,014,400,000	667,172,310	66.77
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240,000,000	239,519,800	99.80
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik serta Media Luar Ruang	601,000,000	501,000,000	83,36
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				

	Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	umlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150,200,000	141,534,472	94.23
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	123,400,000	89,756,400	72.74
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	803,064,000	398,570,668	49.63
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,764,957,000	1,656,212,018	93.84
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	120,700,000	21,120,500	17.50
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	779,250,000	613,676,000	78.75
Total			6,436,971,000	4,910,612,390	76.29

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	umlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1,864,800,000	1,243,200,000	66,67
Total			1,864,800,000	1,243,200,000	66,67
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK					
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
	Sub Kegiatan : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	250,000,000	230,635,000	87,03
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,000,000	27,235,000	45,39
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	181,000,000	163,011,383	90,06
Total			506,000,000	420,881,383	83,18

Jumlah	11,284,220,292	9,001,165,025	79,77
--------	----------------	---------------	-------

BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa untuk mencapai target indikator sasaran pada sasaran 1 yaitu mencapai indikator Persentase KB Aktif dijabarkan kedalam 1 program dan 4 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan besar anggaran Rp. **6,436,971,000,-** dan realisasi Rp. **4,910,612,390,-** capaian 76,29%, yaitu : **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** meliputi :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas

- Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah

- Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
- Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Untuk mencapai target indikator sasaran pada sasaran 2 yaitu mencapai indikator Indeks Pembangunan Keluarga dijabarkan kedalam 1 program, 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan besar anggaran Rp. **1,864,800,000,-** dan realisasi Rp. **1,243,200,000,-** capaian **66,67%**, yaitu : **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** meliputi :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENGGERAKAN DAN PENYULUHAN

Untuk mencapai indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, dijabarkan dalam 1 program dan 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan besar anggaran **Rp. 506,000,0000,-** dan realisasi **Rp. 420,881,383,-** capaian **83,18%**, yaitu : **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** meliputi :

- 1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

- a. Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

- 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
- b. Sub Kegiatan Pengolahan dan PelaporanData Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA)

Akuntabilitas Keuangan untuk dengan Sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak bertujuan Menurunkan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan gender dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.34
Akuntabilitas Keuangan Bidang PPPA Tahun 2024

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) TermasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6,812,000	6,812,000	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	250,000,000	231,161,600	92,46

	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Total			256.812.000	237.973.600	92,66
Predikat Kabupaten Layak Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73,271,600	71,906,600	98,14
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitasi	19,719,400	19,603,200	99,41
Total			92,991,000	91.509.800	98,41
Grand Total			349.803.000,-	329.483.400,-	99,92

Untuk mencapai indikator IPG dan Predikat Kabupaten Layak Anak, dijabarkan dalam 2 program, 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan besar anggaran **Rp. 349.803.000,-** dan realisasi **Rp. 329.843.400,-**capaian **99,92%**, yaitu :

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- 1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah

Tabel 3.35
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	29	Bidang PPPA Seksi PP
		2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	29 OPD	Bidang PPPA Seksi PP
		3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Media Massa	Bidang PPPA Seksi PA
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	3 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PA
		5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Bidang PPPA Seksi PA
		6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PA
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PA
		8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	7 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PP
		9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	7 Kader	Bidang PPPA Seksi PA
		10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PP
		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PP
		12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	11 Kebijakan	Bidang PPPA Seksi PP
		13	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga	Bidang PPPA Seksi PA
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Bidang PPPA Seksi PP

b.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabarandari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun anggaran 2024 merupakan media komunikasi pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) tahun 2024 ditetapkan sebanyak 4 sasaran dengan 7 indikator kinerja, dengan kategori capaian sebagai berikut :

a) 7 indikator mencapai target;

Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik BOKB Bidang Kesehatan Sub Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp. 8.052.771.000,- terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 1.709.957.000,- dan DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp. 6.342.814.000,-.

Alokasi dana APBD DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 guna mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran sebesar Rp. 3.231.449.292,- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 1.555.404.640,- dengan rincian DAU SG Pendidikan sebesar Rp. 515.000,- dan DAU SG Kesehatan sebesar Rp. 490.000.000,- DAU Fleksibel Rp. 550.404.640,- dengan sumber dana PAD sebesar Rp. 418.197.014 dan sumber dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 132.207.626,- dan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,676,044,652 dan direalisasikan sebesar Rp. 9.001.165.025 atau 79,77 %

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja DP2KBP3A tahun 2024 antara lain :

- Keterbatasan pengetahuan pegawai DP2KBP3A terkhusus eselon II dan III tentang penetapan kinerja OPD;
- Keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan untuk pencapaian beberapa indikator kinerja disatukan/digabung;
- Untuk penyediaan data bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunggu data dari OPD terkait dan BPS;
- Kurangnya koordinasi baik secara internal antar bidang maupun dengan OPD terkait.

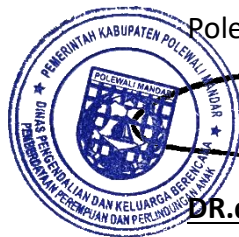
Adapun yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja DP2KBP3A tahun 2024, sebagai berikut :

- Menyarankan jangan hanya bagian perencanaan OPD saja disosialisasikan tentang penetapan kinerja tetapi disosialisasikan juga kepada Kepala OPD dan Kepala Bidang/Sekertaris DP2KBP3A selaku pelaksana dan penentu target indikator kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- Mengefisienkan anggaran dengan menyatukan dan menggabung beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian beberapa target indikator;
- Terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait baik secara lisan maupun tulisan guna memperoleh data terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Melaksanakan pertemuan secara intern guna membahas tentang penetapan kinerja dan secara eksternal dengan stakeholder terkait guna mendapat informasi dan data yang terkait.

Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.

Demikianlah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) ini dibuat. Semoga LAKIP DP2KBP3A Tahun 2024 bermanfaat terutama bagi aparatur DP2KBP3A sendiri. Sekian dan Terima Kasih.



Polewali, 06 Februari 2025

DR.drg. SRIHARNI PATANDIANAN. MARS

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 197011102002122007



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA DP2KBP3A TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan H. Andi Depu No. 177 Polewali Kode Pos 91315

Website: www.dp2kbp3a.polmankab.go.id email: dp2kbp3a@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya di sebut **pihak pertama**

Nama : **MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama

DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197011102002122007

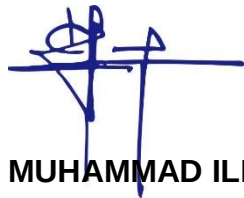
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,99%	0,72%
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB aktif	56,96%	88,27%
3	Meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	51,80	51,50
4	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,92%	93,10%
5	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya
6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.439.368.749	APBD
2	Pengendalian Penduduk	Rp	506.000.000	APBD / APBN
2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	4.727.014.000	APBD / APBN
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1.864.800.000	APBN
3	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	190.000.000	APBD
4	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	300.000.000	APBD
JUMLAH		Rp	10.027.182.749	APBD/APBN

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua



MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama



DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19701110 200212 2 007

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1
Uraian Sasaran**

Indikator Kinerja

Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Sumber data penduduk yang digunakan adalah Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat berikut ini : - Tahun 2020 : 1,25 - Tahun 2021 : 1,22 - Tahun 2022 : 1,17	
--	--

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	Pemenuhan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana meliputi pembinaan Poktan Tribina serta UPPKA, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{Pt}{Po} \right) \times 100$ r = Laju pertumbuhan penduduk t = Jangka waktu perhitungan ln = Eksponen dengan nilai 2,718281828 Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun perhitungan	Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase laju Pertumbuhan Penduduk	0,72%	Setelah dilakukan perbandingan mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia untuk tahun 2022 sejumlah 1,17 % maka di tahun 2023 penurunan Laju pertumbuhan penduduk diharapkan bisa tercapai dengan meningkatnya Program Bangga Kencana di Kabupaten Poewali Mandar

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan

Indikator Kinerja

Persentase Peserta KB Aktif Pasangan Usia Subur (PUS) : Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi dan secara Aktif KB masih menggunakan atau memakai metode alat kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Metode itu adalah MOW : Medis Operatif Wanita atau tubektomi MOP : Medis Operatif Pria atau vasektomi". **Klasifikasi** : Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Kondom, Peserta KB Aktif Suntik, Peserta KB Aktif Pil, Peserta KB Aktif AKDR, Peserta KB Aktif MOP, Peserta KB Aktif MOW, Peserta KB Aktif Implan.

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Pelaksanaan dan pelayanan Program Keluarga Berencana meliputi konseling kontrasepsi mulai dari suntik, pil, kondom, hingga layanan kontrasepsi MKJP yang meliputi IUD, Implant, MOP dan MOW	Jumlah Peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur * 100%	Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Peserta KB Aktif	88,27	Pasangan Usia Subur (PUS) : Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi dan secara Aktif KB masih menggunakan atau memakai metode alat kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Metode itu adalah MOW : Medis Operatif Wanita atau tubektomi MOP : Medis Operatif Pria atau vasektomi". Klasifikasi : Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Kondom, Peserta KB Aktif Suntik, Peserta KB Aktif Pil, Peserta KB Aktif AKDR, Peserta KB Aktif MOP, Peserta KB Aktif MOW, Peserta KB Aktif Implan

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Keluarga Sejahtera

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa sangat penting dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga untuk menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Capaian iBangga di level Kab/Kota, Provinsi dan Nasional dapat menentukan level pembangunan keluarga suatu wilayah. Termasuk mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga ditingkat keluarga	iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).	Bidang KB dan KKS Dinas P2KBP3A

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Indeks Pembangunan Keluarga	51,50	Penentuan target 51,50 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024, didasari atas capaian tahun 2023 (51,80)

Penjelasan Kinerja 4**Uraian Sasaran****Indikator Kinerja**

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Indeks Pembangunan Gender	Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$	Bidang PPPA Dinas P 2 K B P 3 A

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Indeks Pembangunan Gender	93,10	Penentuan target 93,10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024, didasari atas capaian tahun 2023 (91,92) berarti ada peningkatan Indeks sebesar 1,18

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan Kebijakan Pengembangan KLA untuk mewujudkan KLA. Pasal 4 (1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang: a. konsep KLA; b. hak anak; dan c. pendekatan pengembangan KLA. (2) Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat mengevaluasi penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	• Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak • Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.	Predikat KLA : 6. PRATAMA Skor 500-600 7. MADYA Skor 600-700 8. NINDYA Skor 700-800 9. UTAMA Skor 800-900 10. KLA Skor 900-1000	Bidang PPPA Dinas P2KBP3A

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	MADYA	Penentuan target Madya karena capaian Pratama telah diperoleh Kabupaten Polewali mandar pada tahun 2022 berupa penghargaan Bupati Polewali mandar oleh Menteri PPPA

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas KominfoSP
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan}}{\text{Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan}} \times 100$	Sekretariat Dinas KominfoSP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A (86,00) tahun 2023 optimis diraih Dinas KominfoSP, dengan melihat Capaian SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat B; 78,27), tahun 2021 (Predikat A; 82,76) dan tahun 2022 (predikat A; 85,94)
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,87%), 2021 (100%) serta 2022 (100%)

3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas KominfoSP yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Sangat Baik; 81,49), 2021 (Predikat Sangat Baik;97,04) serta 2022 (Predikat Sangat Baik;98,79). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik tahun 2023
---	--	-------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan H. Andi Depu No. 177 Polewali Kode Pos 91315

Website: www.dp2kbp3a.polmankab.go.id email: dp2kbp3a@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr.Hj. ANDI EMY PURNAMA,MMR.DPK**
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : **DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN,MARS**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua
Kepala DP2KBP3A,

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama
Sekretaris



DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN,MARS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701110 200212 2 007

dr.Hj. ANDI EMY PURNAMA,MMR.DPK
Pangkat : Pembina
NIP. 19840713 200909 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS DALDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase tertib keuangan perangkat daerah	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	89,11%	100%
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	99,88%	100%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	99,87%	100%
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	100%	100%
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	100%	100%

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
	Program Penunjang Urusan I Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	1.534.000	DAU
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp	155.035.000	DAU
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	146.125.000	DAU
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	34.222.000	DAU
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	99.000.000	DAU
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	17.180.420	DAU
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	2.440.000	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	73.509.444	DAU
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	17.000.000	DAU
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	10.000.000	DAU
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	5.000.000	DAU
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.877.706.885	DAU
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	5.000.000	DAU
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	5.000.000	DAU
JUMLAH		Rp	2.448.752.749	DAU

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala DP2KBP3A,



DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701110 200212 2 007

Pihak Pertama
Sekretaris

dr. Hj. ANDI EMY PURNAMA, MMR.DPDK
Pangkat : Pembina
NIP. 19840713 200909 2 008

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Dinas KominfoSP
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan}}{\text{Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan}} \times 100$	Sekretariat Dinas KominfoSP

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A (86,00) tahun 2023 optimis diraih Dinas KominfoSP, dengan melihat Capaian SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat B; 78,27), tahun 2021 (Predikat A;82,76) dan tahun 2022 (predikat A;85,94)
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas KominfoSP menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (98,87%), 2021 (100%) serta 2022 (100%)
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Dinas KominfoSP yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Sangat Baik; 81,49), 2021 (Predikat Sangat Baik;97,04) serta 2022 (Predikat Sangat Baik;98,79). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan H. Andi Depu No. 177 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dp2kbp3a.polmankab.go.id email: dp2kbp3a@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. HARIANTI SANAWIAH, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya di sebut **pihak pertama**

Nama : **dr.Hj. ANDI EMY PURNAMA,MMR.DPDK**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris,

dr.Hj. ANDI EMY PURNAMA,MMR.DPDK
Pangkat : Pembina
NIP. 19840713 200909 2 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Hj. HARIANTI SANAWIAH, S.Pd.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19670215 198703 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS P2KBP3A KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
I	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat	100%	100%
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
II	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
1	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan	23 Orang	24 Orang
2	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
III	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
1	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	23 Orang	24 Orang
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan
III	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100%	100%
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang diolah dan	23 Orang	24 Orang
IV	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100%	100%
1	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis	40 Jenis
2	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis
3	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	2 Jenis	2 Jenis
4	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Jenis	2 Jenis
5	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	20 SPPD	30 SPPD
		Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25 SPPD	35 SPPD

IV	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBM	100%	100%
1	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	2 Jenis. 5 Mobil, 73 Motor	2 Jenis. 5 Mobil, 73 Motor
2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis	2 Jenis
IV	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100%	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi	2 Jenis x 12 Bulan	2 Jenis x 12 Bulan
3	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	2 Jenis	2 Jenis

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	10.000.000	DBH Provinsi
2	Koordinasi dan Penyusunan	Rp	5.000.000	DBH Provinsi
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.877.706.885	DAU Umum
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	5.000.000	DBH Provinsi
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	5.000.000	DBH Provinsi

IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	34.222.000	DBH Provinsi	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	99.000.000	DBH Provinsi	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	17.180.420	DBH Provinsi	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	2.440.000	DBH Provinsi	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	73.509.444	DBH Provinsi	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	1.534.000	PAD	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	146.125.000	DBH Provinsi dan PAD	
II	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Rp	155.035.000	DBH Provinsi	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	17.000.000	DBH Provinsi	
JUMLAH		Rp	2.448.752.749	DAU	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris,



dr.Hj. ANDI EMY PURNAMA,MMR.DPDK
Pangkat : Pembina
NIP. 19840713 200909 2 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian



Hj. HARIANTI SANAWIAH, S.Pd.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19670215 198703 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan H. Andi Depu No. 177 Polewali Kode Pos 91315
Website: www.dp2kbp3a.polmankab.go.id email: dp2kbp3a@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. NURLAELAH, S.Pd**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan

Selanjutnya di sebut **pihak pertama**

Nama : **DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya di sebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala DP2KBP3A,

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Penggerakan dan
Penyuluhan



DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701110 200212 2 007

Hj. NURLAELAH, S.Pd
Pangkat : Pembina
NIP. 19681104 198903 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
DINAS P2KBP3A KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	<i>Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</i>	<i>Persentase laju pertumbuhan penduduk</i>	0,99%	0,72%

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
I	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	Rp	265.000.000	DAU SG Bid Pendidikan
1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Rp	265.000.000	DAU SG Bid Pendidikan
II	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	241.000.000	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Rp	60.000.000	DAK Non Fisik
2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp	181.000.000	DAK Non Fisik
JUMLAH		Rp	506.000.000	DAK Non Fisik/DAU SG Bid Pendidikan

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala DP2KBP3A,



DR. drg. SRIHARNI PATANDIANAN, MARS
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701110 200212 2 007

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Penggerakan dan
Penyuluhan

Hj. NURLAELAH, S.Pd
Pangkat : Pembina
NIP. 19681104 198903 2 008

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENGGERAKAN DAN PENYULUHAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Sebagaimana amanat **UU No. 52 tahun 2009** tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Presiden RI No. 62 tahun 2010** tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan **Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011** tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN dan Pemerintah Daerah, mengisyaratkan pentingnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana diwujudkan meliputi pembinaan Kelompok Ketahanan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UUPKA), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Sedangkan untuk Program [Keluarga Berencana](#) meliputi konseling dan pelayanan [kontrasepsi](#) mulai dari suntik, pil, kondom, hingga [layanan kontrasepsi](#) MKJP yang meliputi IUD, Implant, MOP dan MOW

Indikator Kinerja

Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Sumber data penduduk yang digunakan adalah Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat dilihat berikut ini :

- Tahun 2020 : 1,25
- Tahun 2021 : 1,22
- Tahun 2022 : 1,17

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	Pemenuhan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana meliputi pembinaan Poktan Tribina serta UPPKA, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{Pt}{Po} \right) \times 100$ r = Laju pertumbuhan penduduk t = Jangka waktu perhitungan ln = Eksponen dengan nilai 2,718281828 Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun perhitungan	Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase laju Pertumbuhan Penduduk	0,92%	Setelah dilakukan perbandingan mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia untuk tahun 2022 sejumlah 1,17 % maka di tahun 2023 penurunan Laju pertumbuhan penduduk diharapkan bisa tercapai dengan meningkatnya Program Bangga Kencana di Kabupaten Polewali Mandar

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA,
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1
Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan

Indikator Kinerja

Persentase Peserta KB Aktif Pasangan Usia Subur (PUS) : Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi dan secara Aktif KB masih menggunakan atau memakai metode alat kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Metode itu adalah MOW : Medis Operatif Wanita atau tubektomi MOP : Medis Operatif Pria atau vasektomi". **Klasifikasi** : Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Kondom, Peserta KB Aktif Suntik, Peserta KB Aktif Pil, Peserta KB Aktif AKDR, Peserta KB Aktif MOP, Peserta KB Aktif MOW, Peserta KB Aktif Implan.

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Pelaksanaan dan pelayanan Program Keluar ga Berencana meliputi konseling kontrasepsi mulai dari suntik, pil, kondom, hingga layanan kontrasepsi MKJP yang meliputi IUD, Implan, MOP dan MOW	Jumlah Peserta KB Aktif Modern dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur * 100%	Peraturan Kepala BKKBN No. 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Peserta KB Aktif	80,99	Pasangan Usia Subur (PUS) : Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang istrinya lebih dari 49 tahun tetapi masih mendapat menstruasi dan secara Aktif KB masih menggunakan atau memakai metode alat kontrasepsi terus-menerus untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Metode itu adalah MOW : Medis Operatif Wanita atau tubektomi MOP : Medis Operatif Pria atau vasektomi". Klasifikasi : Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif Kondom, Peserta KB Aktif Suntik, Peserta KB Aktif Pil, Peserta KB Aktif AKDR, Peserta KB Aktif MOP, Peserta KB Aktif MOW, Peserta KB Aktif Implan

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kapasitas Keluarga Sejahtera

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Pemerintah melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa sangat penting dalam mewujudkan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga untuk menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Capaian iBangga di level Kab/Kota, Provinsi dan Nasional dapat menentukan level pembangunan keluarga suatu wilayah. Termasuk mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga ditingkat keluarga	iBangga dibentuk dari tiga dimensi yakni: Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Capaian iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: rentan (dibawah 40), berkembang (40-70) dan tangguh (diatas 70).	Bidang KB dan KKS Dinas P2KBP3A

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENJELASAN
1	Indeks Pembangunan Keluarga	51,50	Penentuan target 51,5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024, didasari atas capaiantahun 2023 (51,8)

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN
KINERJA
DP2KBP3A
TAHUN 2024

Pengukuran Kinerja DP2KBP3A Tahun 2024				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Membaiknya Pemerataan Gender	IPG & IDG	Indeks	IPM perempuan / IPM laki-laki
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan	%	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah Penduduk Perempuan * 100%
3	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Predikat kabupaten layak anak	Predikat	Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Prosentase Anak Korban Kekerasan	%	Jumlah anak (Penduduk usia < 18 korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia < 18 tahun * 100%

5	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju pertumbuhan penduduk	%	$r = \frac{P_t - P_0}{t \cdot P_0} \times 100$ Penjelasan P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke-t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = jangka waktu r = laju pertumbuhan penduduk e = bilangan eksponensial
6		Persentase peserta KB aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Anak yang dilahirkan oleh Perempuan Usia Subur (15-49 tahun)}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Subur (15-49 tahun)}} \times 100\%$
7		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	Dimensi Ketenteraman Dimensi Kemandirian Dimensi Kebahagiaan: Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: - iBangga yang kurang baik (rentan): nilai di bawah 40 - iBangga yang cukup baik (berkembang): nilai antara 40-70 - iBangga yang baik (tangguh): nilai di atas 70¹

8		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	%	Persentase Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
9		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Indeks	$\frac{\text{Jumlah seluruh IKP layanan} \times 100}{\text{Jumlah layanan publik dinas yang dilakukan survey kepuasan}}$ Nilai-nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
				 KEPALA DINAS, Dr. drg. Hj. Sriharni P. MARS Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19701110 200212 2 007

LAMPIRAN 3

REALISASI
ANGGARAN
DP2KBP3A TAHUN
2024

**REALISASI ANGGARAN DINAS P2KBP3A
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks	93,1 Indeks	256.812.000	93,1 Indeks	237.973.600	92,66
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	6.812.000	1 Dokumen	6.812.000	100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	OPD	29 Perangkat Daerah	6.812.000	29 Perangkat Daerah	6.812.000	100
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	1 Lembaga	250.000.000	1 Lembaga	231.161.600	92,46
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1 Lembaga	250.000.000	1 Lembaga	231.161.600	92,46
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat	KLA Predikat	92.991.000	KLA Predikat	91.509.800	98,41
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	96 Orang	92.991.000	61 Orang	91.509.800	98,41
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	96 Orang	73.271.600	96 Orang	71.906.600	98,14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35 Kasus Dokumen	19.719.400	35 Kasus Dokumen	19.603.200	99,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	2.126.646.292	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	2.096.987.852	98,61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	15.000.000	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	15.000.000	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	1.681.044.652	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	1.681.044.652	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	308 Orang/Tahun	1.676.044.652	308 Orang/bulan	1.676.044.652	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	5.000.000	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	5.000.000	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	100,00

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	173.217.640	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	166.135.140	95,91
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1 Paket	30.428.380	0,77 Paket	24.851.380	81,67
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1 Paket	55.170.000	1 Paket	55.170.000	100
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Paket	1 Paket	13.110.420	1 Paket	13.110.420	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1 Dokumen	1.000.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	73.508.840	2 Laporan	73.003.340	99,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	147.659.000	• 66 Persen • 66 Persen • 61 Persen	135.454.000	91,73
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3 Laporan	1.534.000	3 Laporan	1.379.000	89,90
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	2 Laporan	146.125.000	2 Laporan	134.075.000	91,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	104.725.000	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	94.354.060	90,10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	79 Unit	87.725.000	79 Unit	77.504.060	88,35
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2 Unit	17.000.000	2 Unit	16.850.000	99,12
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persen	0,72 Persen	506.000.000	0,25 Persen	420.881.383	83,18
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persen	0,72 Persen	265.000.000	0,39 Persen	230.635.000	87,03
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan	6 laporan Satuan Pendidikan	265.000.000	6 laporan Satuan Pendidikan	230.635.000	87,03
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,72 Persen	241.000.000	0,09 Persen	190.246.383	78,94
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	27.235.000	45,39
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1 Dokumen	181.000.000	1 Dokumen	163.011.383	90,06
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persen	88,27 Persen	6.436.971.000	88,27 Persen	4.910.612.390	76,29
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	88,27 Persen	2.695.400.000	26,32 Persen	1.989.742.332	73,82
Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1 Laporan	840.000.000	1 Laporan	582.050.222	69,29
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	1 Laporan	1.014.400.000	1 Laporan	667.172.310	65,77

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		%
		K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program BanggaKencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1 Laporan	240.000.000	1 Laporan	239.519.800	99,80
Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana Melalui MediaMassa Cetak dan Elektronikserta Media Luar Ruang	Dokumen	1 Dokumen	601.000.000	1 Dokumen	501.000.000	83,36
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persen	0,72 Persen	150.200.000	0,05 Persen	141.534.472	94,23
Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	90 Orang	150.200.000	6 Orang	141.534.472	94,23
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,72 Persen	2.812.121.000	0,29 Persen	2.165.659.586	77,01
Pengendalian PendistribusianAlat dan Obat Kontrasepsi danSarana Penunjang PelayananKB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan danJejaringsnya	Laporan	1 Laporan	123.400.000	1 Laporan	89.756.400	72,74
Peningkatan KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Orang	1697 Orang	803.064.000	784 Orang	398.570.668	49,63
Penyediaan Sarana PenunjangPelayanan KB	Unit	5 Unit	1.764.957.000	5 Unit	1.656.212.018	93,84
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Laporan	1 Laporan	120.700.000	0,16 Laporan	21.120.500	17,50
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persen	0,72 Persen	779.250.000	0,72 Persen	613.676.000	78,75
Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana diKampung Keluarga Berkualitas	Kampung	47 Kampung	779.250.000	47 Kampung	613.676.000	78,75
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persen	88,27 Persen	1.864.800.000	88,27 Persen	1.243.200.000	66,67
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Persen	88,27 Persen	1.864.800.000	88,27 Persen	1.243.200.000	66,67
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	888 Orang	1.864.800.000	888 Orang	1.243.200.000	66,67
			11.284.220.292		9.001.165.025	79,77

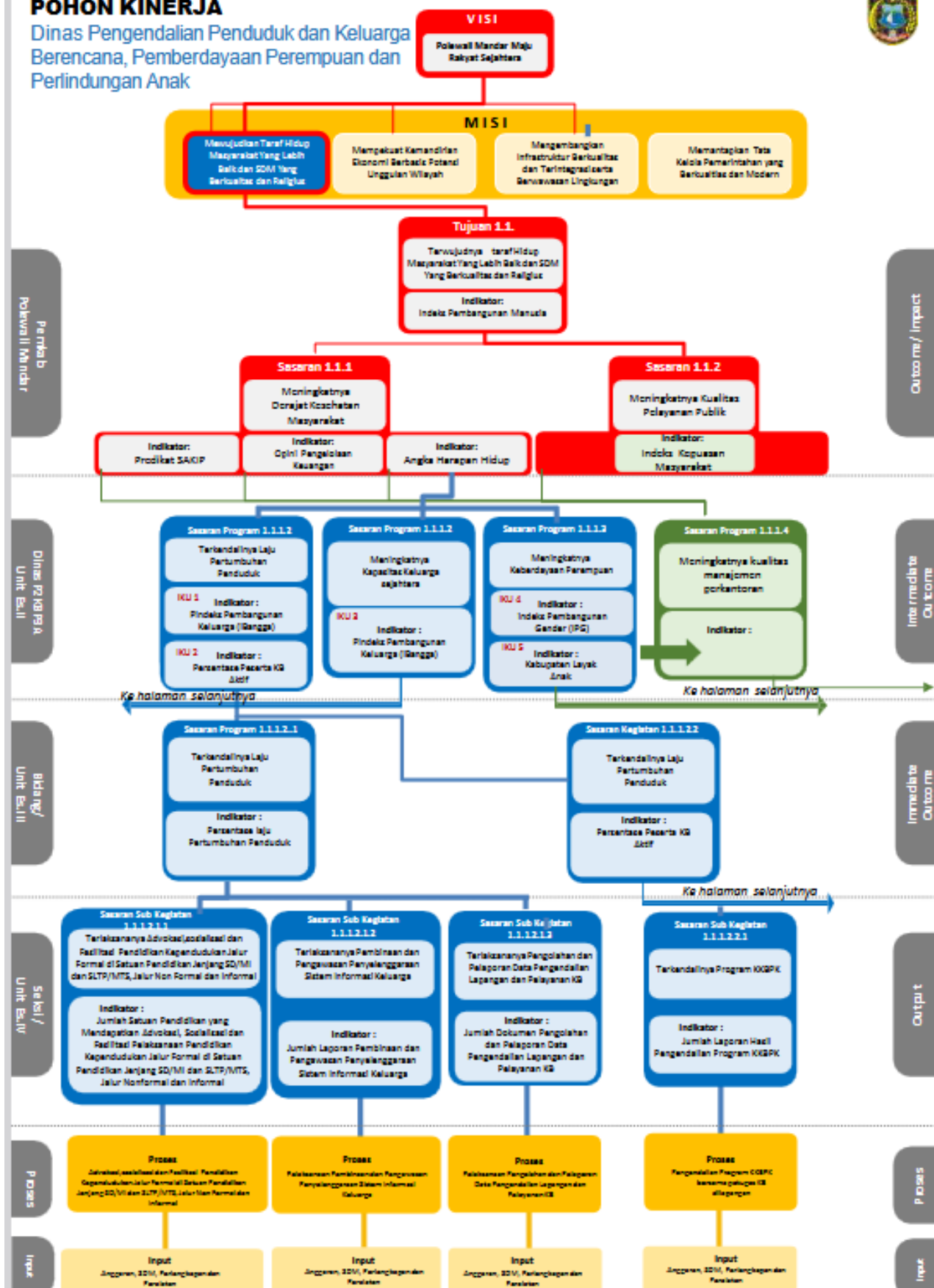
LAMPIRAN 4



POHON
KINERJA
DP2KBP3A TAHUN
2024

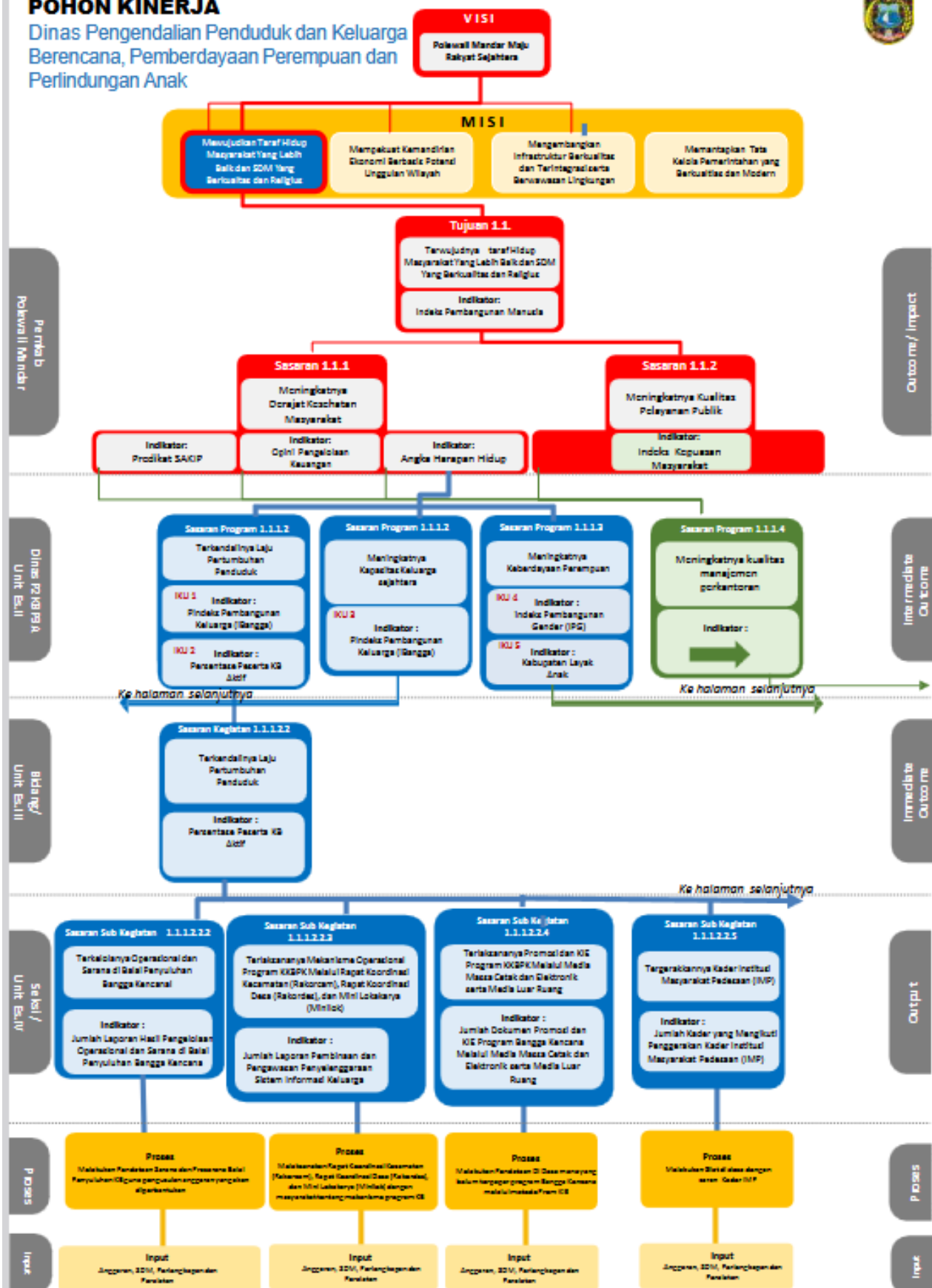
POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



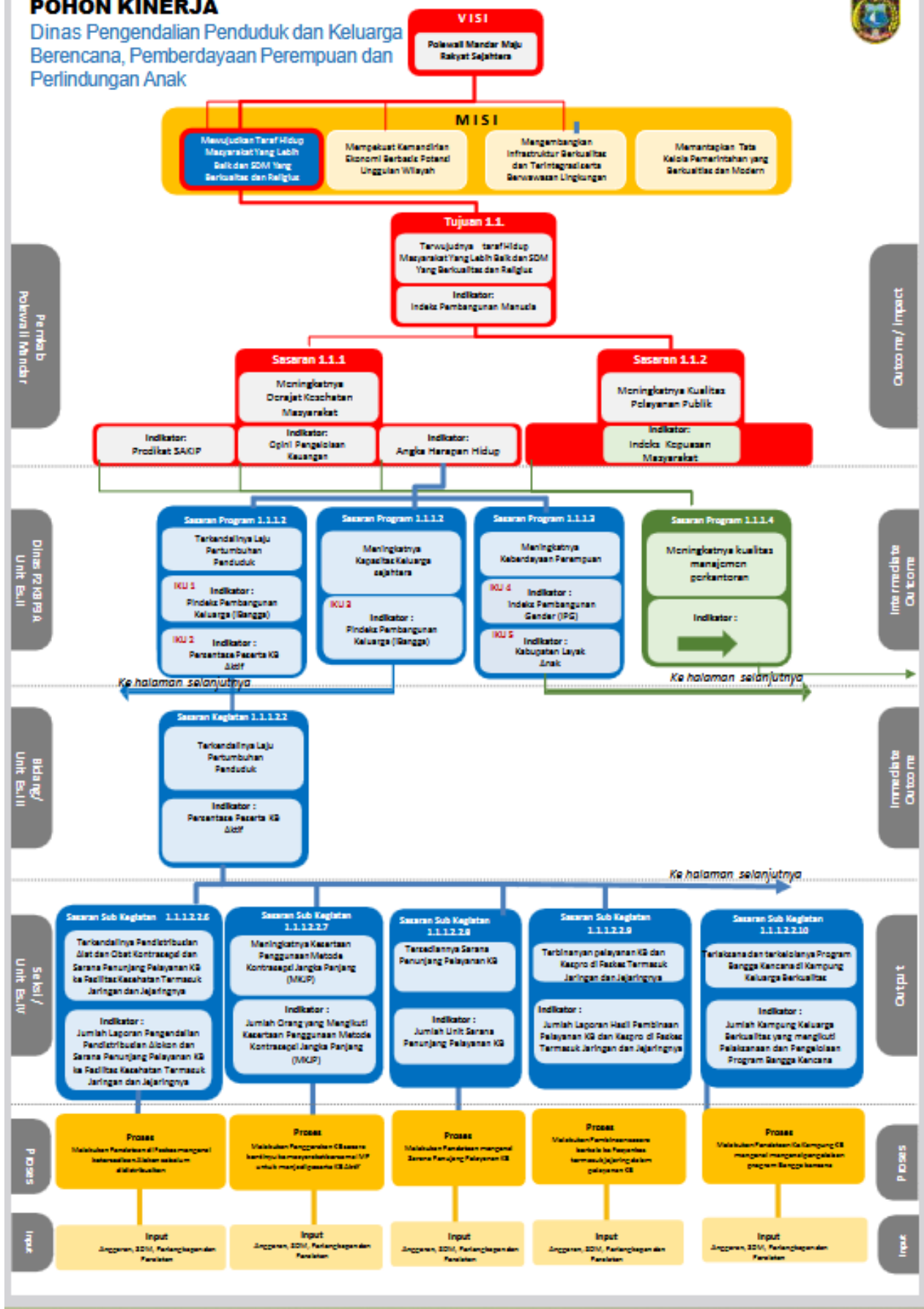
POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

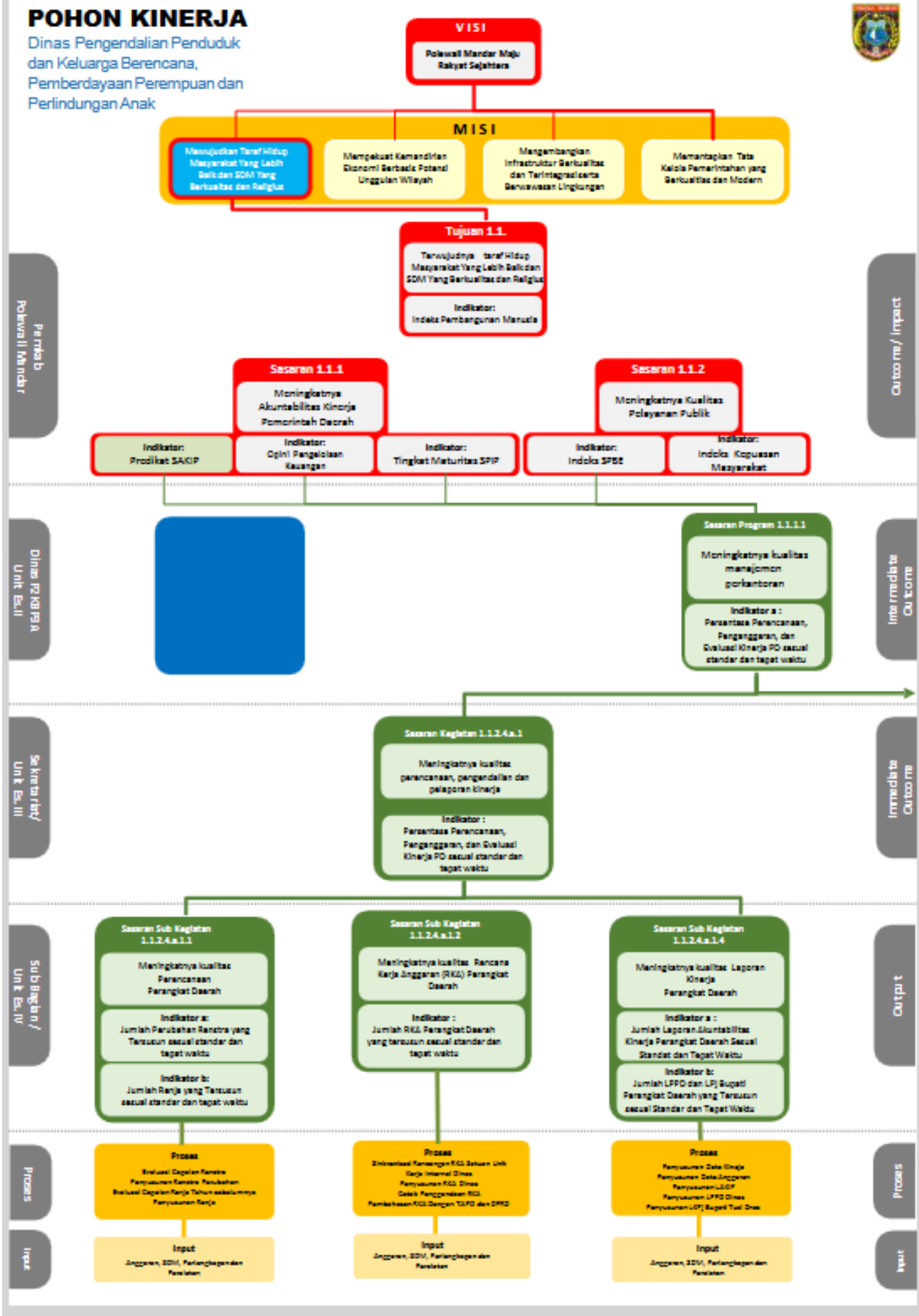


VISI
Polewali Mander Maju
Rakyat Sejahtera



POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Perkab
Polewali Mandar

Output m/ Impact

Dinas p2kbar/iv
Unit Es. II

Intermediate
Output

Sekretariat/
Unit Es. III

Intermediate
Output

Subbagin/
Unit Es. IV

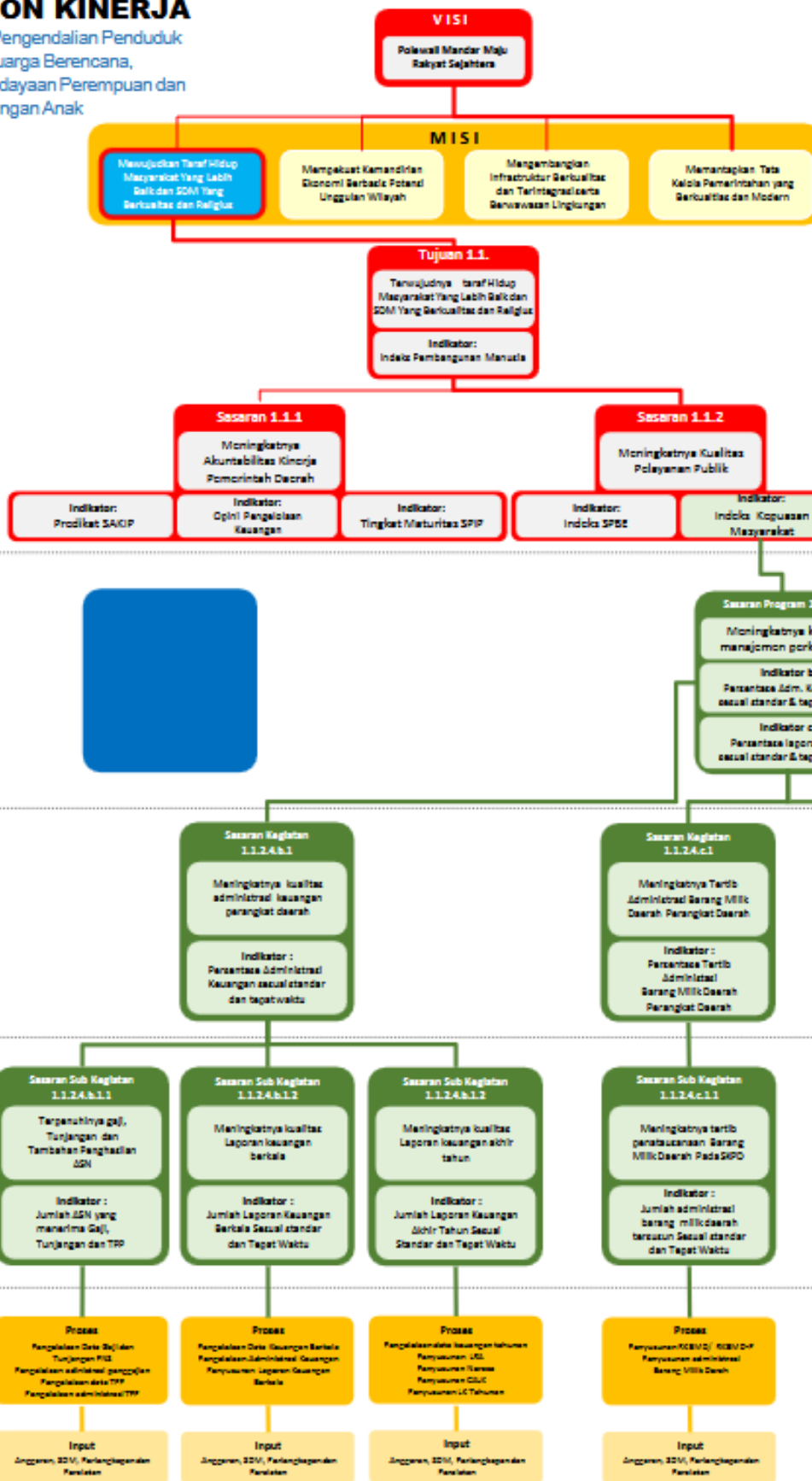
Output

Proses

Proses

Input

Input

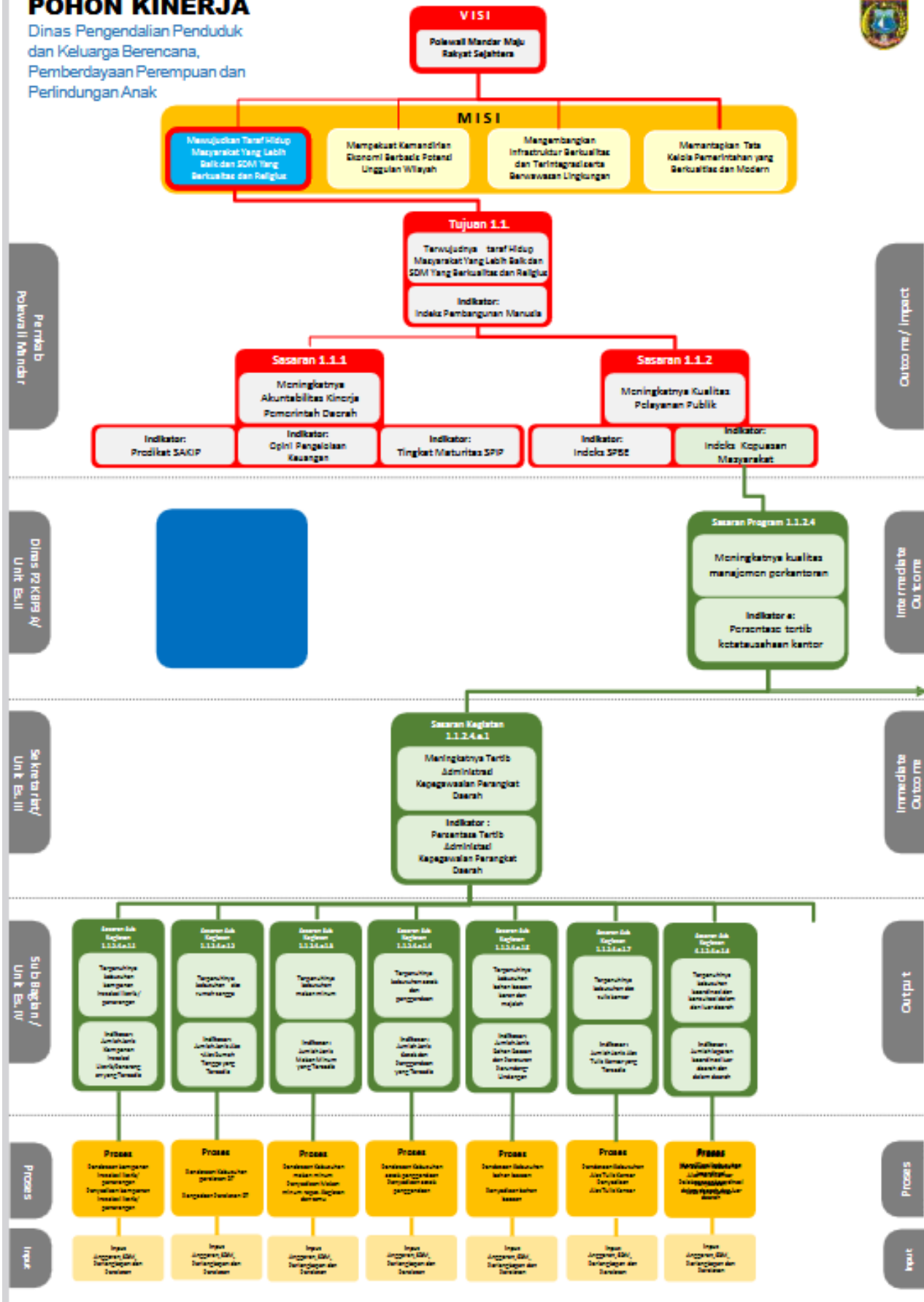


Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak



POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Peringkat
Pemerintah
Provinsi

Outcome/ Impact

Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Intermediate Outcome

Sekretariat/
Unit Es. III

Immediate Outcome

Su. Bina/
Unit Es. IV

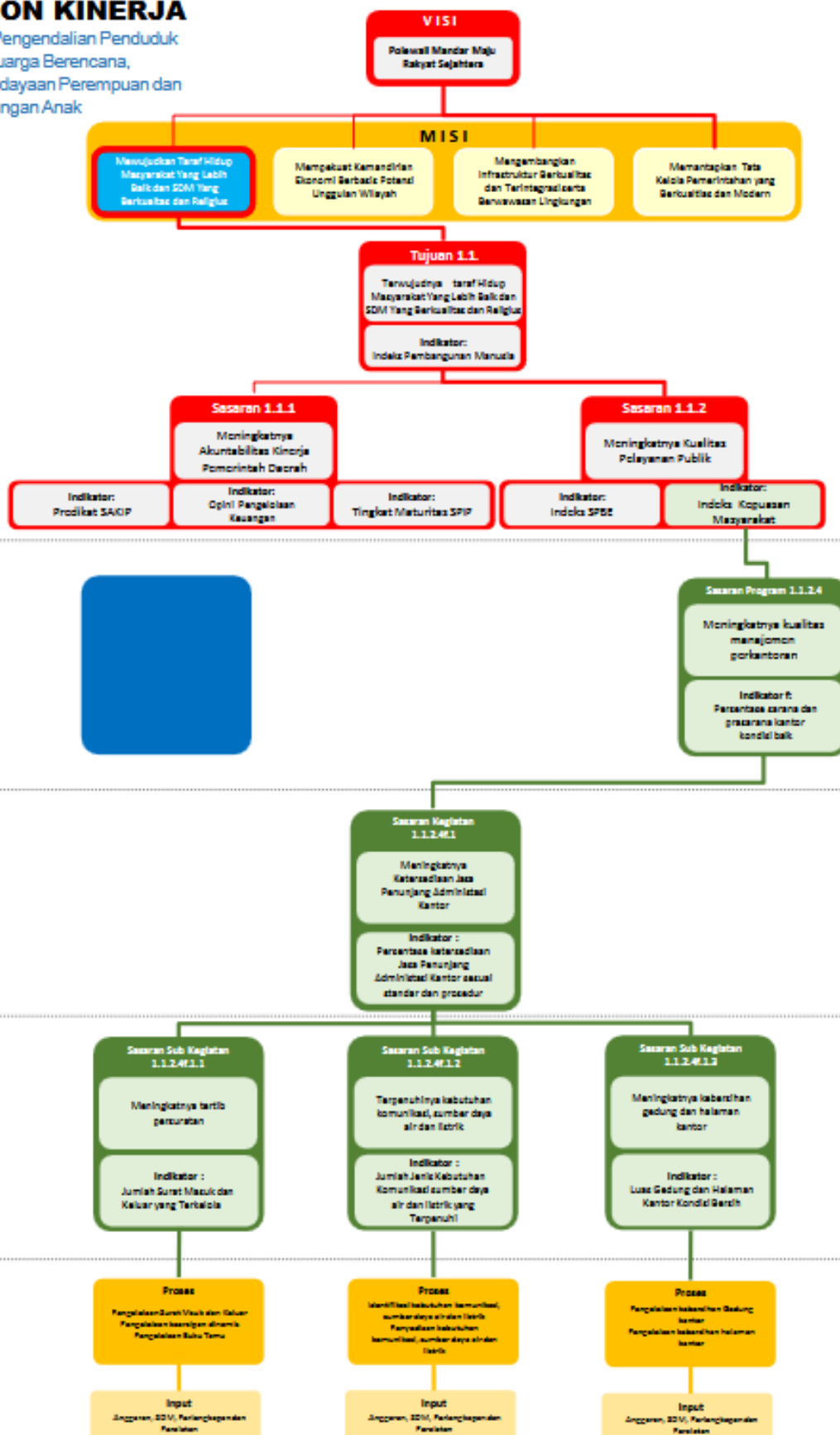
Output

Proses

Proses

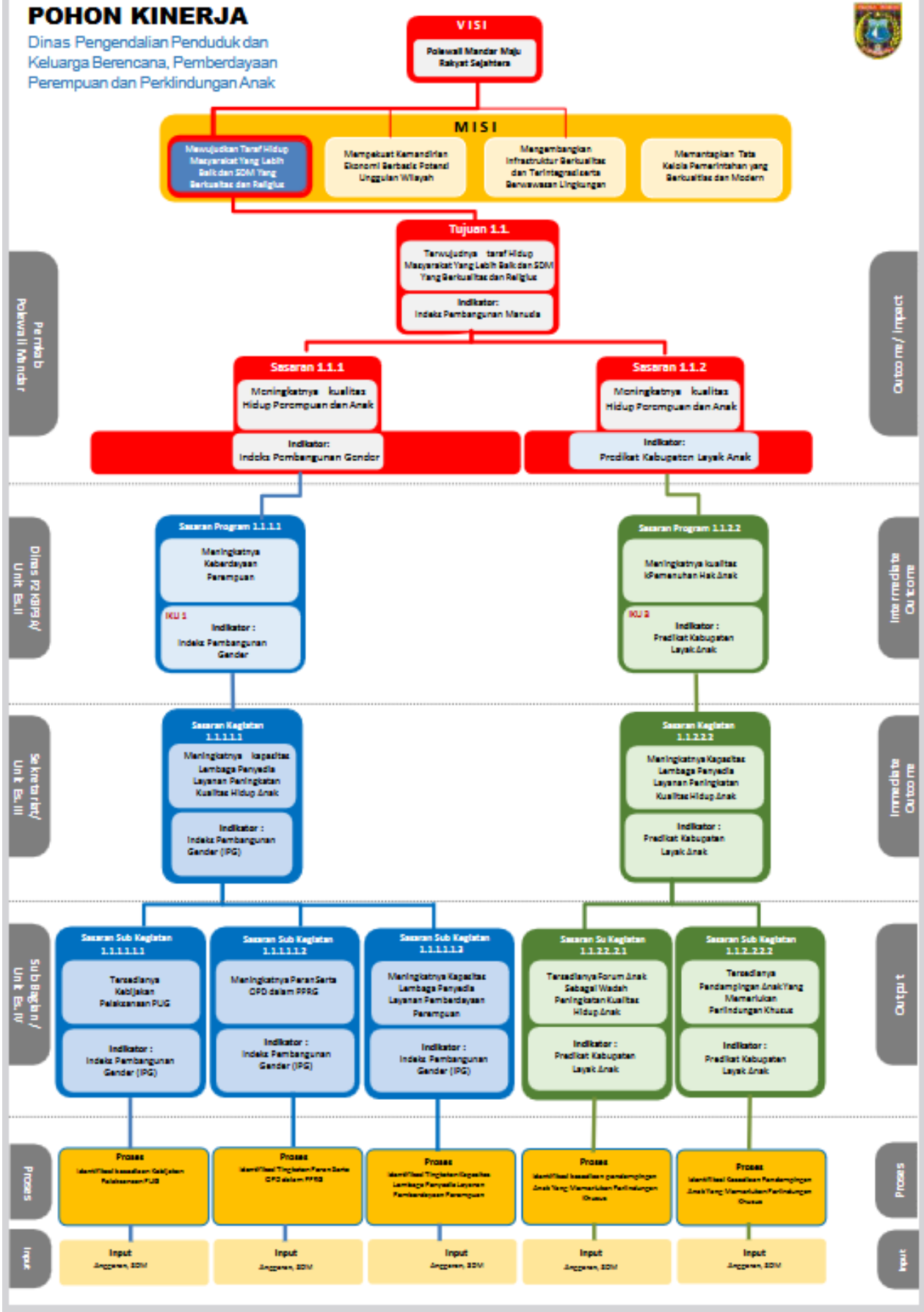
Input

Input



POHON KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



LAMPIRAN 5

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2024

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI DINAS P2KBP3A KAB. POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Nama Program	Strategi	Capaian
1	2	3	4	5	8		11
I	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM); Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah; Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah	Indeks	93,1 Indeks	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	a. Penyediaan Sistem Informasi Gender dan Anak; b. Penyediaan tenaga ahli dalam penanganan KDRT seperti : tenaga pendamping, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, tenaga sosial dan tenaga ahli lainnya; c. Advokasi tentang kesetaraan dan keadilan gender; d. Advokasi penganggaran responsif gender dan anak; e. Pendampingan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga; f. Sistem pencatatan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga;	93
II	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	KLA Predikat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		98
III	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	• Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor • Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persen	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan pengeluaran publik dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai dengan cara memperkuat pengawasan internal dan eksternal, memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. 1. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai 2. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja 3. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai	98,61

IV	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,72 Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	a. Manajemen penyediaan dan distribusi alokon; b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB khususnya MKJP; c. Pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi bagi remaja; d. Persebaran ratio PKB/PLKB di setiap Kecamatan; e. Pengembangan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera f. Pengembangan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKA); g. Pemuktahiran Data Kependudukan dan Keluarga (SIGA); h. Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD); i. Penguatan dan kualitas lini lapangan (PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD, kader KB) termasuk mekanisme operasional; j. Sistem pencatatan pelaporan serta penyediaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB; k. Pelatihan Bidan khususnya Bidan Swasta untuk pemasangan IUD dan Implan; l. Pelatihan Dokter khususnya Dokter Swasta untuk pemasangan MOW dan MOP;	83
V	Meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB aktif	Persen	88,27 Persen	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		76
VI	Meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	88,27 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		67

LAMPIRAN 6

EVALUASI
INTERNAL
LAPORAN
MONEV
RENCANA AKSI

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN																	
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
KABUPATEN POLEWALI MANDAR																	
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024																	
No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)		Ket.
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10 = 9/4*100		15
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks kepuasan masyarakat (IKM); Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah; Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah	93,1 Indeks	256.812.000					19,54 Indeks	53.903.320	73,56 Indeks	6.812.000	93,1 Indeks	237.973.600	100	92,66	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga PemerintahKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan KebijakanPengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.812.000							1 Dokumen	6.812.000	1 Dokumen	6.812.000	100	100	
1.1	Koordinasi dan SinkronisasiPerumusan KebijakanPelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan KebijakanPengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0													
1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) TermasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Perangkat Daerah	6.812.000							29 Perangkat Daerah	6.812.000	29 Perangkat Daerah	6.812.000	100	100	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	250.000.000					1 Lembaga	53.903.320			1 Lembaga	231.161.600	1 Lembaga	92,46	
2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	250.000.000					1 Lembaga	53.903.320	1 Lembaga	177.258.280	1 Lembaga	231.161.600	100	92,46	

II	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Predikat	92.991.000			KLA Predikat	31.001.400	KLA Predikat	25.101.400	KLA Predikat	35.407.000	KLA Predikat	91.509.800	KLA Predikat	98,41	
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Orang	92.991.000			32 Orang	31.001.400	25 Orang	25.101.400	39 Orang	35.407.000	61 Orang	91.509.800	100	98,41	
1.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96 Orang	73.271.600			32 Orang	23.898.200	33 Orang	25.101.400	31 Orang	22.907.000	96 Orang	71.906.600	100	98,14	
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Kasus Dokumen	19.719.400			12 Kasus Dokumen	7.103.200			23 Kasus Dokumen	12.500.000	35 Kasus Dokumen	19.603.200	100,00	99,41	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor • Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	2.126.646.292	• 20 Persen • 18 Persen • 20 Persen	501.192.913	• 30 Persen • 27 Persen • 30 Persen	745.639.553	• 20 Persen • 18 Persen • 20 Persen	452.062.307	• 30 Persen • 27 Persen • 30 Persen	398.093.079	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	2.096.987.852	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	98,61	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor • Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	15.000.000					• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	15.000.000			• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	15.000.000	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	100,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000					1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000	100,00	100,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000					1 Laporan	5.000.000			1 Laporan	5.000.000	100,00	100,00	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor • Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	1.681.044.652	• 26 Persen • 23 Persen • 26 Persen	501.192.913	• 31 Persen • 28 Persen • 31 Persen	601.095.446	• 20 Persen • 18 Persen • 20 Persen	351.018.807	• 23 Persen • 21 Persen • 23 Persen	227.737.486	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	1.681.044.652	• 100 Persen • 90 Persen • 100 Persen	100	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/Tahun	1.676.044.652	89 Orang/Tahun	501.192.913	107 Orang/Tahun	601.095.446	61 Orang/Tahun	346.018.807	52 Orang/Tahun	227.737.486	308 Orang/bulan	1.676.044.652	100	100	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000					1 Laporan	5.000.000			1 Laporan	5.000.000	100	100,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	• Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu • Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	5.000.000					• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	5.000.000			• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	5.000.000	100	100,00	
3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000					1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.000.000	100	100,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu • Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	173.217.640			• 32 Persen • 32 Persen • 29 Persen	74.229.200	• 15 Persen • 15 Persen • 12 Persen	27.073.500	• 53 Persen • 53 Persen • 49 Persen	64.832.440	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	166.135.140	100	95,91	
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.428.380			0,39 Paket	13.520.000	0,17 Paket	5.186.500	0,21	6.144.880	0,77 Paket	24.851.380	100	81,67	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.170.000			0,31 Paket	17.190.000	0,37 Paket	20.687.000	0,32 Paket	17.293.000	1 Paket	55.170.000	100	100	

4.3	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.110.420			0,24 Paket	4.261.200			0,76 Paket	8.849.220	1 Paket	13.110.420	100	100	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000													
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	73.508.840			2 Laporan	39.258.000	2 Laporan	1.200.000	2 Laporan	32.545.340	2 Laporan	73.003.340	100	99,31	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu • Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	147.659.000			• 42 Persen • 42 Persen • 39 Persen	62.544.000	• 24 Persen • 24 Persen • 22 Persen	36.150.000	• 34 Persen • 34 Persen • 29 Persen	36.760.000	• 66 Persen • 66 Persen • 61 Persen	135.454.000	• 66 Persen • 66 Persen • 61 Persen	91,73	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.534.000			2 Laporan	769.000,00			1 Laporan	610.000	3 Laporan	1.379.000	100	89,90	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	146.125.000			2 Laporan	61.775.000	2 Laporan	36.150.000	2 Laporan	36.150.000	2 Laporan	134.075.000	100	91,75	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu • Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	104.725.000			• 6 Persen • 6 Persen • 4 Persen	7.770.907	• 17 Persen • 17 Persen • 15 Persen	17.820.000	• 77 Persen • 77 Persen • 71 Persen	68.763.153	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	94.354.060	• 100 Persen • 100 Persen • 90 Persen	90,10	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	87.725.000			1 Unit	1.770.907	20 Unit	17.820.000	58 Unit	57.913.153	79 Unit	77.504.060	100,00	88,35	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	17.000.000			1 Unit	6.000.000			1 Unit	10.850.000	2 Unit	16.850.000	50,00	99,12	

IV	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,72 Persen	506.000.000			0,08 Persen	62.090.893	0,17 Persen	120.641.560	0,47 Persen	238.148.930	0,25 Persen	420.881.383	34,72	83,18	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,72 Persen	265.000.000			0,13 Persen	49.592.600	0,26 Persen	97.299.400	0,33 Persen	83.743.000	0,39 Persen	230.635.000	54,17	87,03	
1.1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	6 laporan Satuan Pendidikan	265.000.000			1 laporan Satuan Pendidikan	49.592.600	3 laporan Satuan Pendidikan	97.299.400	3 laporan Satuan Pendidikan	83.743.000	6 laporan Satuan Pendidikan	230.635.000	100,00	87,03	
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,72 Persen	241.000.000			0,03 Persen	12.498.293	0,06 Persen	23.342.160	0,63 Persen	154.405.930	0,09 Persen	190.246.383	0,13	78,94	
2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	60.000.000							1 Laporan	27.235.000	1 Laporan	27.235.000	100	45,39	
2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	181.000.000			0,06 Dokumen	12.498.293	0,12 Dokumen	23.342.160	0,82	127.170.930	1 Dokumen	163.011.383	100	90,06	
V	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	88,27 Persen	6.436.971.000			9,64 Persen	703.469.600	19,81 Persen	1.445.071.713	58,82 Persen	2.762.071.077	88,27 Persen	4.910.612.390	33,36	76,29	
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peserta KB aktif	88,27 Persen	2.695.400.000			14,70 Persen	448.954.800	11,62 Persen	355.038.332	61,95 Persen	1.185.749.200	26,32 Persen	1.989.742.332	100	73,82	
1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	840.000.000			0,10 Laporan	91.866.800	0,51 Laporan	334.390.422	0,39 Laporan	155.793.000	1 Laporan	582.050.222	100	69,29	
1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1 Laporan	1.014.400.000			0,3 Laporan	37.850.000	0,2 Laporan	20.647.910	0,95 Laporan	608.674.400	1 Laporan	667.172.310	100	65,77	

1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program BangsaKencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat KoordinasiKecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	240.000.000			0,49 Laporan	118.838.000			0,51 Laporan	120.681.800	1 Laporan	239.519.800	100	99,80	
1.4	Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana Melalui MediaMasa Cetak dan Elektronikserta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak danElektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	601.000.000			0,33 Dokumen	200.400.000			0,67 Laporan	300.600.000	1 Dokumen	501.000.000	100,00	83,36	
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,72 Persen	150.200.000			0,05 Persen	10.895.000			0,67 Persen	130.639.472	0,05 Persen	141.534.472	100	94,23	
2.1	Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	90 Orang	150.200.000			6 Orang	10.895.000			84 Orang	130.639.472	6 Orang	141.534.472	100	94,23	
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,72 Persen	2.812.121.000			0,04 Persen	184.391.800	0,43 Persen	1.005.355.381	0,25 Persen	975.912.405	0,29 Persen	2.165.659.586	100	77,01	
3.1	Pengendalian PendistribusianAlat dan Obat Kontrasepsi danSarana Penunjang PelayananKB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan danJejarinya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejarinya	1 Laporan	123.400.000			0,04 Laporan	5.356.800	0,35 Laporan	43.490.740	0,61 Laporan	40.908.860	1 Laporan	89.756.400	100	72,74	
3.2	Peningkatan KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1697 Orang	803.064.000			378 Orang	179.035.000	406 Orang	192.275.668	60 Orang	27.260.000	784 Orang	398.570.668	50,0	49,63	
3.3	Penyediaan Sarana PenunjangPelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	1.764.957.000					5 Unit	764.016.773	5 Unit	892.195.245	5 Unit	1.656.212.018	100	93,84	

